



Kolaborasi CSO dan Pemerintah Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas di Indonesia



PATTIRO

Laporan Tahunan
2014

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
Sambutan Ketua Pembina	4
Pengantar Direktur Eksekutif.....	6
Peristiwa Penting di Tahun 2014	8
Fokus Area Transparansi	14
Pembelajaran Mengawal Implementasi UU KIP.....	40
Fokus Area Lainnya	59
Prioritas Agenda 2015	66
Produk-produk Pengetahuan PATTIRO	68
Dinamika Internal Lembaga	70
Laporan Keuangan PATTIRO 2013-2014.....	73

Ringkasan Eksekutif



Laporan Tahunan 2014 ini mengambil tema utama Fokus Area Transparansi, yaitu menyorot tentang perjalanan PATTIRO mempromosikan isu transparansi, pembelajaran yang didapat dan agenda selanjutnya. Penekanan pada isu transparansi ini mengingat sebagian besar aktifitas yang dijalankan pada tahun 2014 terkait dengan isu transparansi.

Secara ringkas, perjalanan PATTIRO dalam mempromosikan isu transparansi dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu Tahap 1: 2000-2006 (memperjuangkan RUU Kebebasan Informasi bersama dengan Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi Publik [KMIP] dan mulai mengenalkan kekuatan informasi kepada masyarakat serta memfasilitasi pengorganisasian masyarakat dalam bentuk forum warga/community center); Tahap 2: 2007-2008 dengan fokus pada kesiapan badan publik dalam memberikan pelayanan informasi publik dan memfasilitasi warga untuk melakukan uji akses (permintaan informasi) kepada badan publik; Tahap 3: 2009-2011 fokus pada penguatan badan publik dalam membangun sistem pelayanan informasi publik, sekaligus implementasi UU KIP dan fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi sekaligus penguatan kapasitas komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi publik; dan Tahap 4: 2012-2014, kami mengimplementasi UU KIP secara masif melalui pengembangan skema terpadu. Skema ini meliputi: penguatan kapasitas masyarakat melalui pendampingan terhadap kelompok warga (community center/CC); penguatan badan publik; fasilitasi pembentukan dan penguatan Komisi Informasi Provinsi; dukungan kepada badan publik di tingkat pusat (Komisi Informasi dan Kemendagri) dalam pembuatan panduan pelaksanaan UU KIP; serta memfasilitasi jaringan FOINI melalui optimalisasi peran Sekretariat FOINI dan memfasilitasi implementasi OGP melalui peran Sekretariat Tim Inti Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.

Dari pengalaman mempromosikan keterbukaan informasi tersebut, beberapa pembelajaran yang diperoleh pada tingkat masyarakat antara lain bahwa forum warga (*community center/CC*) cukup efektif sebagai sarana pusat pembelajaran warga terkait transparansi; advokasi tidak dapat dilakukan

secara *vis a vis*, dalam arti mempertentangkan antara pemerintah dengan masyarakat; dan pentingnya membangun koalisi masyarakat sipil sebagai bagian dari katalisator keterbukaan informasi publik. Pada tingkat badan publik, kami melihat melalui implementasi UU KIP, telah mengubah mindset pejabat publik dari “tertutup” menjadi “terbuka”. Selain itu, penghargaan (*award*) cukup efektif memotivasi pemerintah daerah dan pusat mengimplementasikan UU KIP. Pembelajaran lainnya yaitu permintaan informasi dari warga penting untuk mengefektifkan layanan informasi badan publik. Sedangkan pada komisi informasi, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan rekrutmen komisioner menjadi sangat menentukan efektifitas KI Provinsi. Selain itu, dukungan Pemerintah Provinsi, terutama dalam alokasi dana operasional, sekretariat dan kegiatan turut menentukan kinerja KI Provinsi.

Bila dianalisis lebih dalam, keterbukaan informasi publik memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan badan publik itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat lebih banyak terpapar informasi (melek informasi) dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, keluhan atau usulan perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Umpan balik dari warga masyarakat ini bila direspon dengan positif oleh pejabat publik, akan menjadikan lembaga pemerintah lebih responsif dan tampak lebih akuntabel.

Dampak langsung bagi masyarakat terutama dikaitkan dengan adanya perbaikan pelayanan publik, yang berdampak pada berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan oleh warga masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memperoleh insentif dari transparansi dengan syarat warga dapat mengkonversi informasi publik yang diterimanya menjadi manfaat langsung.

Melalui keterbukaan informasi pula, pemerintah dapat menyampaikan rencana dan program kerjanya, kemajuan hasil kerjanya, termasuk keterbatasan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat, sehingga muncul empati masyarakat terhadap pemerintah. Melalui empati ini, maka sinergi pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki pelayanan publik dapat terbangun, sehingga perbaikan pelayanan oleh pemerintah relatif lebih mudah dilaksanakan.

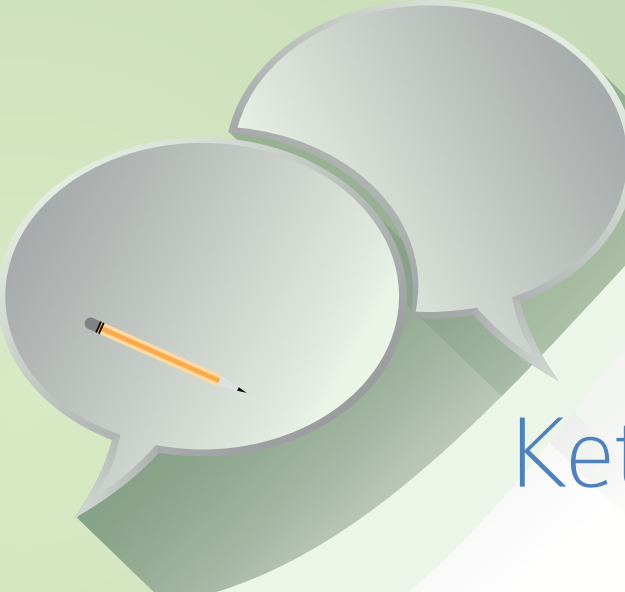
Selain fokus area transparansi, dibahas pula secara ringkas perkembangan fokus area lainnya dari PATTIRO, yaitu pelayanan publik dan pengelolaan keuangan publik.

Pada sisi kelembagaan, aktifitas yang menonjol adalah pengawalan terhadap tiga peran strategis PATTIRO, yaitu pengelolaan pengetahuan, advokasi serta pengembangan kapasitas pegiat dan penguatan kelembagaan. Hal ini dilakukan melalui restrukturisasi Organisasi, penerapan mekanisme



rekrutmen terbuka, peningkatan kapasitas pegiat dan perbaikan manajemen keuangan.

Pada tahun berikutnya, 2015, agenda besar yang akan diusung oleh PATTIRO adalah implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemberlakuan UU Desa ini banyak mengubah konstelasi pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, karena berdasarkan UU Desa, Desa bukanlah perangkat dari pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, besarnya alokasi dana yang akan didistribusikan langsung dan menjadi hak desa telah menarik perhatian berbagai komponen bangsa karena meningkat secara signifikan. Bila dana ini dikelola dengan baik, membawa harapan baru bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat desa. Namun hal yang sebaliknya bisa terjadi, bukannya kesejahteraan yang meningkat, justru korupsi yang terjadi secara masif karena terjadinya penyalahgunaan dana.



Sambutan Ketua Pembina

A da perasaan berbeda yang saya rasakan ketika PATTIRO memasuki tahun ke-15. Jika teknologi mesin waktu bisa ditemukan, rasanya ingin melongok kembali suasana kebatinan saat memulai menegakkan lembaga ini, terutama semangat yang mengiringinya. Semangat pertama ialah ingin berkontribusi terhadap Indonesia yang lebih baik. Suasana pada saat itu menunjukkan betapa masyarakat ingin betul nilai-nilai kebaikan seperti masyarakat bisa mendapatkan informasi apapun tentang pemerintah, ada aspek akuntabilitas yang terjaga, dan menjamin turut sertanya masyarakat di dalam proses pembangunan. Berbeda dengan zaman Orde Baru yang secara semu mengenalkan nilai-nilai itu – seperti penataran P4 yang mendorong partisipasi, padahal lebih mirip indoktrinasi – maka PATTIRO ingin secara sah mendorongnya ke setiap denyut nadi pemerintahan yang baik, diiringi dorongan masyarakat sipil yang aktif dan trengginas.

Semangat yang kedua, ingin menjadi model bagi organisasi masyarakat sipil lain untuk tumbuh berkembang secara alamiah, tanpa perlu ada tokoh besar yang menyapih. Dulu ada istilah organisasi serupa saat itu tumbuh bak cendawan di musim hujan, sama halnya dengan media massa dan partai politik. Dan hingga kini PATTIRO telah menjadi suatu jaringan yang terlibat intervensi ‘rekayasa sosial’ dari Sabang hingga Merauke. Bahkan sebagian aktivisnya juga mengembangkan organisasi lain dengan fokus masing-masing.

Saya sejatinya tidak pernah membayangkan organisasi yang saya mulai bisa seperti ini. Menjadi lembaga yang punya rekam jejak di kabupaten, kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Maka kebanggaan ini ingin saya bagikan kepada kawan-kawan yang merintis sejak awal, yang berproses di tengah, hingga yang terlibat di sesi mutakhir. Dokumen berbentuk laporan tahunan ini hanya salah satu cara kita bercerita institusi ini semakin tumbuh, dan buahnya mulai dinikmati banyak pihak. Dari organisasi yang disangka awalnya sangat umum mengembangkan pola intervensi, bahkan muncul sinisme disebut toserba, namun pada dasarnya saya merasa perlu

memberikan kata kunci khusus: akuntabilitas. Bukankah kata ini yang merupakan inti dari tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari kontribusi bagi Indonesia yang lebih baik, laporan tahunan ini juga menjadi catatan tentang beberapa batu penjurus perubahan. Mulai dari otonomi daerah dan perluasan demokrasi di tahap awal, desentralisasi fiskal, hingga menjadikannya lebih kompatibel dengan akuntabilitas politik – relasi pemilih dengan wakil di parlemen – di mana bahkan kumpulan warga sekalipun dapat terlibat di pemantauan sosial. Bahkan rezim pemerintahan yang baru Presiden Joko Widodo adalah produk dari proses yang disebut sebagai desentralisasi demokratis ini. Sehingga sergapan oligarkhi di pusaran politik tak mampu membendung tokoh yang juga menjadi sahabat salah satu jaringan kita, PATTIRO Surakarta.

Justru saat ini saya malah membayangkan PATTIRO bisa jauh lebih solid dan berkembang. Betapa banyak hasil positif dan pembelajaran dari kegagalan, seharusnya bisa menjadikannya lebih bermanfaat. Semoga ini menjadi biji zarah kebaikan yang hasilnya akan dinikmati oleh bangsa dan peradaban selanjutnya.

Syahrir Wahab



Pengantar Direktur Eksekutif

Tahun 2014 adalah tahun yang istimewa. Tahun ini adalah tahun kelimabelas bagi PATTIRO berkarya dan berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Untuk ukuran manusia, memasuki usia kelima belas adalah memasuki masa *teenager* (remaja) yang menandakan organisasi sudah cukup usia. Untuk itu, PATTIRO terus melakukan upaya pembenahan sistem manajemen organisasi agar kuat menghadapi tantangan internal maupun eksternal yang semakin kompleks, termasuk pembenahan mengenai *fraud handling* untuk memastikan semua program dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini dikarenakan PATTIRO tidak hanya ingin ada saja. PATTIRO ingin terus eksis di dalam memberikan kontribusinya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik untuk kemajuan Indonesia.

Selain itu, di awal tahun 2014 mulai dilaksanakan perubahan fokus area. Jika sebelumnya, fokus area PATTIRO adalah kebijakan publik, pengelolaan keuangan publik dan pelayanan publik, maka fokus area transparansi diperkenalkan untuk menggantikan fokus area kebijakan publik yang kemudian lebur ke fokus area lainnya. Perubahan ini dilandasi pemikiran bahwa kebijakan publik bersifat *mainstream* yang terdapat baik di fokus area pengelolaan anggaran publik, pelayanan publik maupun transparansi.

Tahun 2014 ini, juga merupakan tahun keempat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan di tahun ini pula Indonesia menjadi *chair* OGP. Event internasional OGP yang mengundang peserta dari Asia Pasifik di gelar di Bali pada bulan Mei 2014. PATTIRO, dalam kapasitas sebagai anggota tim inti OGP dan juga sekretariat nasional koalisi masyarakat sipil yang mengawal keterbukaan informasi publik (FOINI), terlibat aktif mensukseskan event ini dan membagi pengalaman PATTIRO di dalam mengawal implementasi UU KIP.

Laporan Tahunan PATTIRO 2014 yang hadir di hadapan pembaca sekalian ini menggunakan format baru, yaitu adanya satu fokus area tertentu yang menjadi tema utama. Untuk tahun 2014 ini, yang menjadi tema utama adalah fokus area transparansi, yang mana banyak kegiatan terkait fokus area ini yang akan dibahas dan dielaborasi *lesson learned* yang didapat. Dengan format laporan tahunan seperti ini, PATTIRO ingin mengokohkan peran strategisnya di dalam advokasi kebijakan publik dan produksi pengetahuan di area transparansi, pengelolaan keuangan publik dan pelayanan publik.

Selamat membaca!

Sad Dian Utomo

Peristiwa Penting di Tahun 2014

Januari

Restrukturisasi Organisasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan lembaga dengan melakukan restrukturisasi organisasi, yaitu adanya jabatan Senior Program Manager, Senior Development Manager dan Senior Operations Manager dan Knowledge Management Officer. Untuk mengisi posisi ini, dilakukan rekrutmen yang menggunakan dua metode, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen terbuka.

Februari

Berpartisipasi pada Konferensi Gender Responsif Budget di Penang Malaysia. PWDC bekerja sama dengan Women PBB, Pemerintah Negara Penang, Pulau Penang Dewan Kota dan Seberang Perai Dewan Kota, menyelenggarakan Konferensi Asia “*Gender Responsive Budgeting (GRB) Narrative: Transforming Institutions, Empowering Communities*” di Penang, Malaysia. Konferensi ini bertujuan untuk mempertemukan para pembuat kebijakan, peneliti, administrator, praktisi dan pelaku masyarakat sipil untuk secara kritis meninjau dan berbagi cerita dan pengalaman. Peserta juga diajak merefleksikan keberhasilan dan tantangan dan menempuh jalan bersama-sama untuk mendukung gerakan Gender Responsif Budget dari masing-masing negara di kawasan Asia. PATTIRO yang diwakili oleh Agus Salim menjadi narasumber sebagai perwakilan Indonesia untuk berbagi pengalaman terkait perkembangan gender di Indonesia. PATTIRO menyampaikan pengalaman advokasi anggaran responsif gender di tingkat nasional dan daerah. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan NGO, akademisi dan pemerintah dari negara-negara seperti, Jerman, Portugal, Indonesia, Malaysia, India, Korea, Austria, dan Nepal.

Maret

Pelatihan pengawasan APBD bagi CSO di Provinsi Papua yang diselenggarakan pada 20-22 Maret 2015 di Hotel Sahid Jayapura. Pesertanya adalah jaringan CSO dari Kabupaten Merauke, Pegunungan Bintang, Supiori, Keerom. Pelatihan ini diselenggarakan oleh PATTIRO atas dukungan AIPD melalui program Support to CSO. Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada jaringan CSO yang ada di provinsi NTT dan Papua

tentang bagaimana melakukan pengawasan anggaran dengan metode *budget tracking*.

Workshop Pedoman Pengawasan PPRG di 3 Daerah. Workshop yang diselenggarakan kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP PA) ini dilaksanakan di tiga daerah, yaitu: Bandung, Surabaya, dan Balikpapan. Workshop ini memiliki tujuan untuk mengujicoba Pedoman Pengawasan PPRG bagi daerah yang telah disusun oleh PATTIRO dengan KPP PA. Hadir dalam workshop ini perwakilan inspektorat provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.

April

Konferensi Internasional OGP Asia Pasifik, Bali. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi International OGP Asia Pasifik. Ini menjadi yang pertama di Asia sejak dimulainya OGP, dan akan berfungsi sebagai platform untuk negara dan masyarakat di kawasan ini untuk menghubungkan, berbagi pengalaman dan saling belajar mengenai manfaat dan peluang pada praktek pemerintahan yang terbuka. PATTIRO yang diwakili oleh Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif, dan Didik Purwandanu, Senior Program Manager, menjadi pembicara di dua diskusi yang berbeda dengan tema pemerintahan daerah yang terbuka dan transparansi untuk pelayanan publik.

Mei

Berpartisipasi pada Unconference Transparency Camp 2014, Washington DC. Transparency Camp 2014 merupakan 'unconference' (acara non-formal) tentang transparansi yang diadakan di Amerika Serikat (AS) untuk keenam kalinya. Pada tahun-tahun sebelumnya, fokus acara ini hanya untuk aktor-aktor transparansi di AS, namun pada tahun ini, dengan 504 partisipan dari 29 negara bagian Amerika dan lebih dari 20 negara di dunia, Sunlight Foundation telah membuat komunitas global bagi para advokat transparansi. Sunlight Foundation sendiri merupakan sebuah lembaga nonpartisan nonprofit di Amerika Serikat yang mengadvokasi pemerintah terbuka secara global dan menggunakan teknologi untuk membuat pemerintah lebih akuntabel di hadapan semua. Nanda Sihombing, Spesialis Open Government dari PATTIRO, mendapatkan beasiswa dari Sunlight Foundation untuk menghadiri Transparency Camp yang membahas implementasi transparansi, baik dari segi kebijakan maupun dari pendekatan teknokratis kebijakan yang ada, di Amerika Serikat dan negara-negara lain di berbagai penjuru dunia.

Juni

Berpartisipasi pada Forum Pelayanan Publik Perserikatan Bangsa-Bangsa 2014, Seoul, Korea Selatan. Berangkat dari pemahaman pentingnya pertukaran pengalaman antar negara, setiap tahun, PBB mengadakan sebuah forum lintas negara dan memberikan penghargaan pada pemerintah negara yang berhasil menunjukkan inovasi dalam meningkatkan layanan publik di

negara mereka masing-masing dalam rangka merayakan Hari Pelayanan Publik. Pada tahun 2014, Forum, Pemberian Penghargaan, dan Perayaan Hari Layanan Publik Perserikatan Bangsa-Bangsa (The 2014 United Nations Public Service Forum, Day and Awards Ceremony) diadakan di Korea Selatan. Bertemakan “Memperbaharui Tata Kelola Pemerintahan untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Rakyat”, forum ini diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Departemen Urusan Ekonomis dan Sosial (UNDESA), Divisi Administrasi Publik dan Manajemen Pembangunan, bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berkolaborasi dengan tuan rumah Pemerintah Republik Korea. Sebagai salah satu anggota Tim Inti Open Government Indonesia dari Masyarakat Sipil, PATTIRO yang diwakili oleh Nanda Sihombing, Spesialis Open Government, diundang menghadiri acara tersebut sebagai salah satu panelis dan berbagi pengalaman dengan peserta yang hadir dari berbagai perwakilan pemerintah negara-negara anggota PBB.

Juli **Workshop Evaluasi APBD.** Workshop ini diselenggarakan kerjasama PATTIRO dengan KPP PA. Tujuannya mendiskusikan instrumen Kemendagri untuk evaluasi APBD provinsi, dan menyepakati Gender Budget Statement (GBS) sebagai salah satu instrumen yang digunakan dalam evaluasi APBD oleh Provinsi. Hadir dalam Workshop ini KPP PA, Kemendagri, dan DPPKAD Provinsi.

Agustus **Workshop Konsolidasi CSO untuk Pemerintahan Terbuka (OGP).** PATTIRO sebagai sekretariat jaringan FOINI dan OGP memfasilitasi Workshop Konsolidasi CSO. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di tiga wilayah provinsi di Indonesia. Medan mewakili Indonesia bagian barat, Palangkaraya mewakili Indonesia bagian Tengah, dan Makassar mewakili Indonesia bagian Timur. Kerja panjang CSO di berbagai sektor tentu telah menghasilkan sesuatu, “kemenangan kecil”, begitu biasa kita menyebutnya. Di sisi lain, ada kecenderungan bahwa perubahan yang berhasil diraih lebih didominasi oleh faktor munculnya “*local champion*” antara lain kepala daerah atau pimpinan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Pun demikian, jaminan keberlanjutan inisiatif yang telah berjalan tidak ada, jika terjadi pergantian posisi pada kepala daerah atau pimpinan SKPD. Pertanyaan reflektif inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya konsolidasi CSO untuk pemerintahan terbuka. Dengan alur pikir mengidentifikasi aset yang telah sama-sama dimiliki, dalam kerangka kerja



panjang di sektor transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Modal sosial yang telah ada ini yang akan digunakan untuk mendorong hasil perubahan yang lebih besar dan sinergis.

September

Berpartisipasi pada Open Government Hub, Washington DC. Forum publik ini bagian dari lokakarya yang diselenggarakan oleh Professor Jonathan Fox dari American University. Acara ini merupakan tindak lanjut dari acara serupa di bulan Mei lalu, yang mengundang para teorisi di isu Transparansi dan Akuntabilitas (T/A). PATTIRO yang diwakili oleh Didik Purwandanu, Senior Program Manager menjadi salah satu pembicara untuk memaparkan pengalaman PATTIRO menjalankan sinergi antara advokasi dan pemantauan publik di nasional dan daerah.

Berpartisipasi pada The OGP Civil Society Peer Learning, The Hague Belanda. Pada event ini, para wakil CSO yang aktif di isu OGP duduk bersama di kantor pusat Hivos di Den Haag, Belanda. Sekitar 20 perwakilan masyarakat sipil dan anggota komite pengarah OGP saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran dalam mengimplementasikan inisiatif global tentang pemerintahan terbuka. Dalam pertemuan ini, PATTIRO yang diwakili oleh Danardono Sirodjudin, Senior Program Manager, menjadi salah satu pembicara pada salah satu sesi pembelajaran bagaimana tim inti CSO dalam OGP di Indonesia memandang capaian, peluang, dan tantangan implementasi dari inisiatif pemerintahan terbuka.

Pelatihan Anggaran Responsif Gender bagi Pemerintah Timor Leste. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan perwakilan pemerintah Timor Leste ke Indonesia untuk belajar bagaimana Pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat pengarusutamaan gender dalam penyusunan kebijakan dan anggaran yang responsif gender. Pelatihan yang diikuti oleh National Director of Policy and Gender Development, President of Gender Working Group, dan Media Officer Secretary of State for the Promotion of Equality (SEPI) ini difasilitasi oleh PATTIRO yang diwakili oleh Agus Salim.

Talkshow Metro TV dalam rangka *Right to Know Day*, 29 September 2014. Ahmad Rofik (SPM Transparansi) menjadi narasumber dalam acara ini bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Seminar Evaluasi Implementasi Instruksi Mendagri tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2015 di Hotel Alila. Narasumber dalam acara ini adalah Ketua Komisi Informasi, Direktorat Keuangan Daerah Kemendagri, Pemerintah Provinsi NTB dan PATTIRO.

Oktober

Workshop OGP di Kuala Lumpur Malaysia. Sebagai tindaklanjut Konferensi OGP Asia Pasifik yang di Bali pada bulan Mei 2014, masyarakat sipil di Malaysia ingin mendorong semangat keterbukaan di kalangan pemerintahan Malaysia dan menyelenggarakan Workshop OGP di Malaysia untuk yang pertama kalinya dengan mengundang pemangku kepentingan terkait. Workshop OGP di Malaysia diselenggarakan oleh Insitute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) dengan sekretariat OMS-OGP Indonesia (PATTIRO dan TII), dan UKP4 yang didukung oleh Ford Foundation, ADB, OSF, dan The Asia Foundation. Meski memiliki keinginan kuat, sayangnya Malaysia belum bisa bergabung menjadi anggota OGP.

Workshop OGP di Kamboja. Lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2014 ini merupakan tindaklanjut dari Konferensi OGP di Bali pada Bulan Mei 2014. Kamboja berkeinginan dapat bergabung menjadi anggota OGP seperti Indonesia dan Filipina. Lokakarya terlaksana atas kerja sama pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), PATTIRO, dan Transparency International (TI) Indonesia dengan organisasi masyarakat sipil Kamboja, Transparency International (TI) Kamboja, Asosiasi Pemuda Khmer (KYA), SILAKA, The Advocacy and Policy Institute (API), and Cooperation Committee for Cambodia (CCC) serta didukung oleh Ford Foundation, Asia Development Bank (ADB), dan Open Society Foundation's South East Asia Initiative (OSF SEAI). Lokakarya OGP di Kamboja ini tak hanya dihadiri oleh rekan-rekan perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil Kamboja, Filipina dan Indonesia tetapi juga dari organisasi masyarakat sipil Vietnam yang dikoordinasi oleh Toward Transparency Vietnam. Perwakilan dari pemerintah Kamboja juga turut hadir seperti sejumlah anggota parlemen, *Undersecretary of State* Ngan Chamroeun yang juga merupakan Wakil Kepala Komite Nasional untuk Sekretariat Pembangunan Demokrasi Daerah (NCDDS).

November

Simposium Nasional Konsolidasi OGP. Pada tanggal 19-20 November 2014, koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk Pemerintahan Terbuka menyelenggarakan sebuah pertemuan nasional di Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dari tiga wilayah di Indonesia; wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Simposium nasional ini bertujuan menyusun agenda dan prioritas masyarakat sipil dalam pelaksanaan OGP pada masa pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla serta membangun sebuah model koordinasi dan jaringan antar CSO yang efektif dan akuntabel. Acara ini menghasilkan agenda prioritas dan rencana aksi jangka pendek dan menengah untuk pelibatan masyarakat sipil dalam OGP; dokumen yang mengatur tata kelola, khususnya tentang mekanisme internal CSO; serta terbentuknya struktur kerjasama dan tata kelola OMS dalam OGP.

Simposium ini terselenggara atas kerjasama beberapa NGO, termasuk PATTIRO dengan dukungan dana dari beberapa lembaga internasional.

Lokakarya OGP, Papua Nugini. Manfaat yang diterima oleh negara anggota OGP juga menarik perhatian pemerintah Papua Nugini. Menanggapi hal itu, pada tanggal 27 dan 28 November 2014, diselenggarakan Lokakarya OGP di Papua Nugini. Kegiatan ini dikordinasikan secara bersama-sama oleh Institute of National Affairs (INA), TI Papua New Guinea, UKP4, Sekretariat OMS *Open Government Partnership* Indonesia, PATTIRO, TI Indonesia, dan Unit Pendukung OGP. Hadir dalam acara ini dari Kementerian Luar Negeri dan berbagai lembaga pemerintah lainnya, perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Papua Nugini dan Indonesia, termasuk Komite Pengarah OGP Sugeng Bahagijo, perwakilan dari media, perwakilan dari berbagai Kedutaan Besar, seperti Kedutaan Besar Selandia Baru, Kedutaan Besar Inggris, dan Kedutaan Besar Indonesia.



Diskusi Kesiapan Implementasi UU Desa, dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014 di Kantor PATTIRO. Diskusi membahas tentang kesiapan pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan warga dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam diskusi dibahas pula pengalaman desa-desa di Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah) di dalam melakukan perencanaan dan penganggaran Desa dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Desember

Fokus Area Transparansi

Sejak tahun 2000, PATTIRO telah aktif bekerja dalam isu transparansi dengan cara bergabung di dalam koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) yang secara intensif mengadvokasi lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebebasan Memperoleh Informasi. Pada tahun 2008, RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Upaya lain yang dilakukan adalah memfasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas *Community Center* (CC) yang secara aktif mengajukan permohonan informasi publik untuk perbaikan pelayanan publik; memfasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas badan publik; terlibat aktif dalam pemilihan komisioner Komisi Informasi Pusat dan pembentukan Komisi Informasi Provinsi, serta pengembangan ICT untuk mendukung transparansi.

Lebih fokus pada transparansi dan OGP.

Setelah melalui perjalanan panjang, maka di tahun 2014 ini, fokus aktivitas meliputi: (i) pendampingan kepada community center; (ii) penguatan badan publik; (iii) pembentukan dan penguatan komisi informasi provinsi; (iv) Fasilitasi Jaringan Masyarakat Sipil FOINI; (v) berperan aktif sebagai Tim Inti OGP dan Sekretariat OGP dari unsur CSO melalui promosi OGP di tingkat sub nasional/daerah dan di ASEAN;¹ (vi) pengembangan ICT untuk transparansi; dan (vii) berpartisipasi aktif dalam sejumlah forum internasional terkait isu transparansi dan OGP.

Salah satu peran sebagai Sekretariat Tim Inti OGP unsur CSO adalah fasilitasi Konferensi

OGP Regional Asia Pacific di Bali pada 6-7 Mei 2014. Kami berkesempatan berbagi pengalaman membangun transparansi, pemerintahan terbuka, dan pelayanan publik, serta teknis pengorganisasian event bersama sekretariat



OGP Asia Pacific Workshop, Kamboja, Oktober 2014

Kolaborasi
CSO dan Pemerintah
Dalam Mendorong
Transparansi dan
Akuntabilitas
di Indonesia

¹ Kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan dari The Ford Foundation, ADB dan OSF.

OGP International. Pada sesi diskusi paralel bertema “Pemerintah Daerah Yang Terbuka”, Sad Dian Utomo (Direktur Eksekutif PATTIRO) berbagi pengalaman mendorong transparansi dan advokasi anggaran.² Turut berbagi pada sesi ini Walikota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia (Ridwan Kamil) dan Vidyadhar Mallik (mantan Menteri Dalam Negeri Nepal). Sementara pada diskusi “Transparansi untuk Pelayanan Publik”, Didik Purwondanu (Senior Program Manager) mempresentasikan model dan pendekatan PATTIRO dalam membentuk dan mendampingi forum warga *atau community center* (CC) untuk membangun relasi masyarakat dengan pemerintah secara kolaboratif.³

A. Pendampingan kepada Community Center

Pendampingan kepada forum warga (*community center*/CC) dilakukan sebagai bagian dari strategi penguatan masyarakat dalam mengakses dan mengkonversi informasi publik menjadi manfaat langsung. Sebanyak 46 CC baru terbentuk di 20 kabupaten yang tersebar di 5 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur; ditambah dengan Kota Ambon (Provinsi Maluku); Kabupaten Kendal (Provinsi Jawa Tengah); Provinsi Banten, dan Kalimantan Tengah. Selain itu tidak kurang dari 326 CC yang sudah terbentuk sebelumnya yang tersebar di 14 kabupaten/kota PATTIRO telah dikuatkan melalui penguasaan substansi dalam rangka memanfaatkan hak atas informasi publik.

Penguatan kemampuan penguasaan substansi oleh CC ini meliputi: (a) mengenal kekuatan informasi dan UU KIP; (b) hak memperoleh informasi publik; (c) mengidentifikasi permasalahan di sekitar yang dialami sehari-hari; (d) mengidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan berdasarkan permasalahan yang dihadapi; (e) mengajukan informasi kepada badan

- 2 Pada sesi tersebut, disampaikan juga kisah sukses jaringan masyarakat sipil yang didukung PATTIRO di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yaitu berhasil mendesakkan alokasi anggaran vaksin anti rabies sebesar Rp 40 juta pada APBD Perubahan Kabupaten Ngada tahun 2013. Selama ini, Pemkab mengandalkan pengadaan vaksin dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan bersumber dari APBN, namun karena tidak mencukupi kebutuhan maka jumlah kasus gigitan anjing yang terjangkiti virus rabies tidak tertangani. Jaringan masyarakat sipil di sana mengadvokasi kebutuhan ini dan akhirnya diakomodasi oleh Pemda pada awal November 2013. Akomodasi anggaran oleh pemerintah daerah ini hanya bisa terjadi pada relasi pemerintah daerah yang terbuka terhadap masyarakat dan CSO.
- 3 Terbitnya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengubah pola advokasi masyarakat yang semula “berhadapan dengan pemerintah” menjadi pendekatan secara kolaborasi (*collaborative engagement*). Masyarakat terlebih dahulu bisa mendapatkan informasi dari badan publik yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Relasi awal dalam mengakses informasi ini, menghasilkan *trust* (kepercayaan) antar keduanya. Modal kepercayaan ini memudahkan tahap berikutnya untuk berdialog dalam menyelesaikan masalah. Skema kolaborasi bahkan sampai pada pelaksanaan pembangunan dimana masyarakat turut berkontribusi sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan. Hal ini dikenal dalam tradisi di Indonesia sebagai *gotong-royong*. CC di Lombok Barat dan Flores Timur misalnya, meminta informasi tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Dinas Pendidikan. Bermodalkan informasi tersebut, CC bisa mengawasi sekolah dan melakukan aksi kolektif ke sekolah supaya bantuan benar-benar tepat bagi yang memerlukan. Upaya ini akhirnya berjalan sukses, walau pada awalnya mendapat resistensi dari manajemen sekolah.

publik; (f) mengkonversi informasi menjadi manfaat langsung; dan (g) memanfaatkan informasi menjadi materi advokasi perbaikan pelayanan publik.

Di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam rangka masalah biaya kesehatan yang tidak terjangkau warga, Pegiat CC Batu Merah dan Kota Bara mengajukan permintaan informasi mengenai cara mengurus kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin. Pegiat CC akhirnya mampu mengadvokasi anggota kelompoknya menjadi peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mengelola JKN. Demikian juga akses informasi Bantuan Siswa Miskin (BSM), menjadi pintu masuk CC mengupayakan anggota kelompoknya mendapatkan beasiswa. Di Manokwari, Provinsi Papua Barat, akses tentang informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Puskesmas, telah memberikan hasil berupa waktu pelayanan puskesmas yang sesuai dengan ketentuan. Sebelumnya, waktu pelayanan puskesmas lebih pendek dari yang semestinya. Kisah pemanfaatan akses informasi ini juga terjadi di wilayah lain. Video dokumenter tentang akses informasi oleh CC di Kabupaten Kendal dan Kota Ambon dapat disaksikan melalui link: <https://youtu.be/ud7uHUyJtIY>

B. Penguatan Badan Publik

Penguatan badan publik yang dilakukan meliputi: penguatan keberfungsian PPID dengan memanfaatkan inovasi aplikasi Sistem Informasi Publik (SIP-PPID), pembentukan PPID pada badan publik, serta pembentukan PPID pada unit layanan. Aplikasi SIP-PPID telah diterapkan pada lima badan publik, setelah setahun sebelumnya dipilotkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kelima badan publik itu adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Ngada, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Aplikasi SIP-PPID ini juga diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinir oleh Bidang Hubungan Masyarakat, Pusat Penerangan Kemendagri, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memfungsikan perannya sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Implementasi UU KIP melalui pengintegrasian laporan pelayanan informasi berbasis SIP-PPID di provinsi atau kabupaten/kota dengan aplikasi SIP-PPID Kemendagri.

Sampai tahun 2014, PATTIRO berkontribusi pada pencapaian kemampuan pengelolaan informasi publik di PPID Provinsi NTB, dan peningkatan kualitas pengelolaan informasi di PPID Provinsi Jawa Timur. Di kedua provinsi ini, PPID-nya telah mampu memberikan pelayanan informasi secara baik. Tiga PPID kabupaten di provinsi NTB (Bima, Dompu, dan Lombok Barat) sudah berfungsi memberikan pelayanan informasi walau belum terbiasa mengelola informasi secara baik. Sementara itu di provinsi lainnya, hasil yang dicapai

beragam. Mulai dari menerbitkan kebijakan dan sistem informasi dan dokumentasi melalui Peraturan Daerah; menetapkan SOP Pelayanan Informasi hingga menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).

Sementara itu, pembentukan PPID pada badan publik dilakukan di Kabupaten Supiori dengan terbitnya Keputusan Bupati Supiori No. 48 tahun 2014 tentang PPID (Utama) Kabupaten Supiori. Pembentukan PPID Utama juga dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di NTT, selain PPID Utama, juga dibentuk PPID SKPD yaitu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendapatan dan Aset Daerah. Sedangkan PPID pada unit layanan terbentuk di Kabupaten Lombok Barat, yaitu 5 PPID Sekolah Dasar, 5 PPID SLTP, dan 6 PPID Puskesmas dan di Kabupaten Dompu (dua PPID Sekolah Dasar). Pembentukan PPID pada unit layanan ini sebagai langkah awal kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara akumulatif, kami telah memfasilitasi terbentuknya 27 PPID Utama di tingkat kabupaten dan provinsi yang tersebar di tujuh provinsi (Jawa Timur, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Tengah, dan Maluku), serta PPID pada unit layanan (*frontline*) terutama di Provinsi NTB. Penguatan PPID dilakukan melalui pelatihan, pendampingan dan studi banding. Orientasi penguatan ini agar PPID mampu menjalankan fungsinya yaitu mampu mengelola informasi publik, dan mampu memberikan pelayanan informasi, termasuk menyusun kebijakan berkaitan dengan sistem dan pelayanan informasi publik, serta pengecualian informasi.

Penguatan lebih lanjut terhadap badan publik juga dilakukan untuk PPID di enam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal) serta empat kabupaten di Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang, Serang, Tangerang, dan Lebak).

C. Pembentukan dan Penguatan Komisi Informasi Provinsi

Tahun 2014 ini, kami meneruskan upaya yang telah dirintis sebelumnya dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi di tiga provinsi⁴ yaitu: Papua Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Hanya di Provinsi Papua saja, Komisi Informasi provinsi sudah ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur Papua pada 18 Juni 2014. Sedangkan pada dua daerah lainnya masih dalam tahap seleksi dan pembentukan panitia seleksi. Dinamika politik lokal seperti proses pemilihan gubernur, dan dinamika birokrasi seperti pergantian personil pada *leading sector* dan panitia seleksi komisi informasi berkontribusi

4 Bekerja sama dengan mitra lokal (Institut Tifa Damai Maluku) kami juga berkontribusi mendukung pembentukan Komisi Informasi di Provinsi Maluku. Di Kota Ambon, Tifa Damai memfasilitasi implementasi UU KIP terutama untuk penguatan CC, pembentukan dan penguatan badan publik, serta inisiasi pembentukan Komisi Informasi di Provinsi Maluku. Tifa damai juga merupakan simpul FOINI di Provinsi Maluku.

signifikan bagi tertundanya pembentukan komisi informasi provinsi.

Di provinsi lain yang sudah terbentuk KI Provinsi-nya, dukungan difokuskan pada peningkatan standar kelembagaan agar bisa menjadi standar nasional (Jawa Timur) dan penguatan kapasitas komisioner dan staf dalam menjalankan tugas, yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa

informasi (Provinsi NTB). Perkembangan penyelesaian sengketa informasi pada tahun 2014 di NTB cukup menggembirakan. Empat sengketa informasi dan satu gugatan putusan KI Provinsi oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Golkar Provinsi NTB, mampu diselesaikan walau harus mengalami gugatan kepada pengadilan negeri setempat. Gugatan ini terjadi, karena prosedur beracara di KI Provinsi NTB yang dinilai cacat.

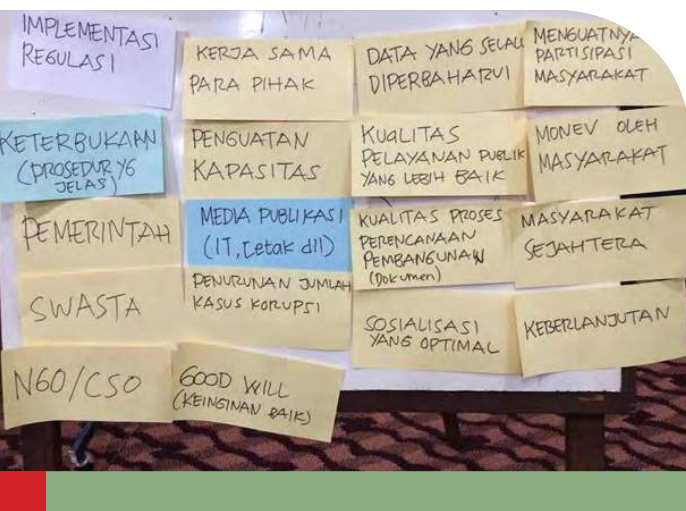
Kami juga memfasilitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam menyusun Pedoman Sistem Layanan Informasi Publik (SLIP) Untuk Desa. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun

2014 tentang Desa telah memperkuat kedudukan Desa sebagai daerah otonom dengan kewenangan untuk mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan) level desa. Peraturan ini akan mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Undang-Undang Desa juga memberikan tanggung jawab kepada Desa untuk merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul, memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya terutama keuangan.

Seiring dengan kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Desa juga dituntut untuk menjadi transparan. Undang-Undang Desa memandatkan Sistem Informasi Desa (SID), dan transparansi pengelolaan informasi pembangunan dan keuangan desa yang harus dapat diakses oleh publik. Pedoman SLIP Untuk Desa ini diharapkan dapat memandu desa selaku badan publik untuk menjalankan UU Desa sekaligus UU KIP secara konsekwen.

D. Fasilitasi Jaringan Masyarakat Sipil FOINI

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu yang intensif mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Saat ini, FOINI memiliki 17 simpul provinsi dengan koordinator tingkat nasional yang berkedudukan di Jakarta. FOINI berkomitmen untuk memperluas simpul jaringan dan menggalang lebih banyak organisasi masyarakat sipil, khususnya di tingkat daerah.



1. Mengelola Sekretariat FOINI

Sebagai Sekretariat FOINI, PATTIRO melaksanakan mandat untuk memfasilitasi *clearing house*, advokasi dan *capacity building*.

Clearing House. Kami memfasilitasi *clearing house* melalui pengelolaan mailing-list (milis) foini@googlegroups.com. Milis ini menghimpun berbagai informasi dan *lesson learned* anggota jaringan dalam mendorong keterbukaan informasi publik. FOINI juga mempunyai media dalam bentuk website, yaitu www.kebebasaninformasi.org dan twitter di: @foiindonesia yang secara operasional dikelola oleh anggota jaringan lainnya yaitu IPC. Sekretariat juga merespons isu-isu aktual dengan aktif menyelenggarakan diskusi bertajuk Open Indonesia Forum (OIF). Tema yang pernah diangkat antara lain: Ancaman terhadap Masa Depan Transparansi Indonesia; Evaluasi Instruksi Mendagri tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah; Integritas Layanan Informasi Badan Pusat Statistik; Evaluasi Transparansi Penyelenggaraan Pemilu 2014; dan Kerahasiaan Data Nasabah versus Tax Ratio.

Advokasi. Pada periode ini, Sekretariat mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk menyelesaikan kasasi yang mempersoalkan putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dan Pengadilan Negeri Batam yang memenangkan mahasiswa pemohon informasi nilai ujian. Dalam proses penanganan kasasi tersebut, MA melebihi batas waktu yang diatur. Peraturan MA No. 2/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengamanatkan batas waktu penyelesaian paling lama 30 hari, namun dalam kasus ini sampai 88 hari belum diputus oleh hakim.

PATTIRO juga mengadvokasi permintaan informasi dokumen "Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI atas Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang Tahap Pertama dan Tahap Kedua" kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permintaan informasi ini berujung pada sengketa. Putusan Komisi Informasi Nomor: 364/XI/KIPPS-A/2013 tanggal 20 Oktober 2014 menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah informasi terbuka. Tetapi BPK kemudian mengajukan banding atas Putusan KI tersebut kepada PTUN Jakarta yang kemudian dibatalkan melalui Putusan MA No. 226/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Januari 2015.

Capacity Building. PATTIRO juga melakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) kepada simpul-simpul di daerah terutama di

Jawa Tengah, Banten dan Maluku, dengan bersama-sama memfasilitasi Pelatihan Pengecualian Informasi Publik yang diikuti perwakilan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.

2. *Penguatan Simpul FOINI di Daerah*

Agenda ini dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan di daerah seperti diskusi, workshop, dan pelatihan baik yang berkaitan langsung dengan keterbukaan informasi maupun isu lain yang relevan seperti OGP. Diskusi dilaksanakan di simpul Provinsi Riau dan di Provinsi Sumatera Utara.

Di Provinsi Riau, FITRA Riau mengelola forum diskusi yang membahas minimnya keterbukaan informasi oleh badan publik. Relatif sedikit badan publik yang membentuk PPID, bahkan baru satu pemerintah kabupaten yang mengaktifkan PPID untuk melayani dan mempublikasikan informasi berkala. Di Pemerintah Provinsi Riau, PPID Utama belum terintegrasi dengan PPID pelaksana (SKPD). Di sisi lain, masyarakat membutuhkan transparansi terutama informasi tata kelola sumberdaya alam (antara lain: pertambangan, kehutanan, perkebunan). Faktanya data dan informasi tersebut masih sulit diakses publik. Tidak transparannya pemerintah dalam memberikan izin usaha, yakni Hak Guna Usaha (HGU), menjadi penyebab konflik agraria. Anehnya Pemda setempat justru mengkategorisasi HGU sebagai informasi dikecualikan (tertutup untuk publik).

Isu lain yang mengemuka dalam diskusi adalah banyak NGO yang belum mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (MenkumHAM) tidak bisa menggunakan hak untuk tahu, terutama dalam sengketa di Komisi Informasi. Hal ini diakibatkan kebijakan pemerintah daerah setempat yang menerjemahkan UU Organisasi Masyarakat (Ormas) secara sepihak. Ormas harus mendaftarkan keberadaannya kepada pemerintah/pemerintah daerah melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). Surat Keterangan Terdaftar (SKT) menjadi syarat NGO yang akan mengajukan permintaan informasi dan sengketa informasi. Padahal SKT bukanlah kewajiban. Sejumlah ormas yang tidak mendaftarkan diri kemudian tergabung dalam koalisi KoKi Rakyat. Diskusi ini sekaligus mengkonsolidasi FOINI Simpul Riau yang beranggotakan YMI, Perkumpulan Elang, WALHI RIAU, dan JMGR.

Di Provinsi Sumatera Utara, simpul FITRA Sumut membahas isu pencalonan kembali komisioner petahana (*incumbent*) Komisi Informasi Sumatera Utara yang menuntut tidak perlu lagi mengikuti

proses seleksi. Isu tersebut digunakan untuk mengkonsolidasikan simpul. Simpul Sumatera Utara menyimpulkan bahwa tafsir atas UU KIP yang mempersepsikan hak istimewa bagi komisioner petahana dalam proses seleksi adalah tafsir yang keliru dan sembrono.

Selain mengelola jaringan, Sekretariat juga mengkoordinasikan sejumlah aktifitas yang dikelompokkan menjadi penguatan badan publik, serta pembentukan dan penguatan Komisi Informasi.

E. Mempromosikan OGP Indonesia di tingkat Sub Nasional

Dalam mengefektifkan perannya sebagai Sekretariat Tim Inti CSO OGP Indonesia, PATTIRO juga merasa penting untuk mendorong pemerintah di tingkat sub nasional/daerah untuk terlibat dalam implementasi OGP. Hal ini dilakukan melalui kegiatan promosi OGP di daerah. Kegiatan promosi itu berupa workshop konsolidasi simpul FOINI dan CSO yang peduli pada isu pemerintahan yang terbuka. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan bahwa perubahan pemerintahan daerah yang terbuka lebih disebabkan oleh munculnya inisiatif "*local champion*". Tidak ada jaminan atas keberlanjutan inisiatif tersebut, jika terjadi pergantian posisi pada kepala daerah atau pimpinan SKPD. Inisiatif itu juga sangat rawan terhenti oleh pergantian posisi/jabatan *champion*. Workshop yang diselenggarakan bertujuan mengidentifikasi aset berupa pembelajaran, *lesson learned*, *good practices* yang telah dicapai bersama dalam memperjuangkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pada pemerintahan. Aset tersebut merupakan modal yang akan digunakan untuk mendorong perubahan yang lebih besar. Diharapkan dengan membawa pembelajaran dan modal sosial pada skema kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah akan membawa perubahan yang lebih besar.

Sebanyak 70 CSO mengambil peran dalam workshop konsolidasi CSO terkait OGP di tingkat daerah ini. Konsolidasi CSO wilayah Indonesia Barat dilaksanakan di Medan. Wilayah Indonesia Tengah di Palangkaraya, dan Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Di samping melakukan diskusi sesama CSO, workshop juga memfasilitasi dialog dengan pemerintah daerah. Di Medan, peserta workshop diterima Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Gubernur mengaku baru mendengar inisiatif pemerintah terbuka (OGP) dan mencatat prinsip-prinsip dalam inisiatif global ini. Walau demikian, Gubernur Gatot juga mengeksplorasi inisiatif keterbukaan yang sudah dimulai Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, salah satunya menetapkan



OGP Regional Workshop, Makassar, Agustus 2014

PPID dan merumuskan SOP tentang Pelayanan Informasi.

Di Palangkaraya, perwakilan CSO berdiskusi dengan Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Syahrin Daulat. Perwakilan CSO menyampaikan empat usulan kepada pemerintah daerah untuk Pemerintahan Terbuka di Indonesia Wilayah Tengah yang merupakan hasil workshop. Empat topik tersebut adalah (1) peta wilayah adat (RTRWP), (2) Pembentukan PPID Kab/Kota, (3) Akses Perizinan, dan (4) Mekanisme Audiensi masyarakat sipil dan pemerintah provinsi.

F. Mempromosikan OGP di Asia Pasifik dan ASEAN

Selain mempromosikan OGP di tingkat daerah, PATTIRO dalam kapasitasnya sebagai Sekretariat Tim Inti CSO OGP Indonesia juga melakukan serangkaian kegiatan promosi OGP di Asia Pasifik dan negara-negara ASEAN. Hal ini dilakukan melalui fasilitasi konferensi regional dan workshop di beberapa negara ASEAN.

1. Konferensi OGP Regional Asia Pasifik

PATTIRO bersama TII dan Tim Inti CSO OGP Indonesia memfasilitasi pelaksanaan Konferensi OGP Kawasan Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali

pada tanggal 6-7 Mei 2014. Beberapa hari sebelum, PATTIRO juga memfasilitasi terlaksananya komunikasi bersama masyarakat sipil bertepatan dengan Hari Masyarakat Sipil pada 4 Mei 2014. Sekitar 183 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari 31 negara Asia Pasifik berkumpul untuk membahas isu-isu kunci yang berkaitan dengan OGP. Komunikasi mengakui dan mendukung semangat OGP sebagai inisiatif multilateral baru yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret dari kalangan pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi,

dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Komitmen ini menanggapi empat nilai utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inovasi.

Setelah mempertimbangkan kemajuan dan pencapaian OGP sejauh ini, Komunikasi mempertimbangkan tiga isu berikut yang relevan dan tepat waktu, untuk dipertimbangkan oleh Ketua dan Wakil Ketua, Komite Pengarah, dan negara-negara anggota OGP: *Pertama*, kepentingan dan kebutuhan untuk membangun, memperluas dan mengkonsolidasikan ruang sipil; *Kedua*, bahwa perumusan agenda



Paska 2015, meliputi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk menggabungkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan *Ketiga*, kebutuhan OGP untuk membangun dan memelihara mekanisme partisipasi masyarakat sipil dan standar untuk memenuhi nilai-nilai OGP itu.

2. Workshop OGP di Beberapa Negara ASEAN

Sebagai tindaklanjut Konferensi OGP Asia Pasifik di Bali, dan merespon minat masyarakat sipil di beberapa negara ASEAN dalam mendorong pemerintahnya masing-masing untuk bergabung dalam OGP, maka PATTIRO, dalam posisinya sebagai Sekretariat Tim Inti CSO OGP Indonesia, bekerjasama dengan masyarakat sipil di negara ASEAN telah melaksanakan workshop OGP di beberapa negara ASEAN. Workshop pertama diselenggarakan di Malaysia pada 13-14 Oktober 2014, oleh Insitute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) Malaysia bekerjasama dengan PATTIRO dan TII, serta UKP4 yang didukung oleh Ford Foundation, ADB, OSF, dan The Asia Foundation.

Workshop berikutnya di Kamboja pada 16-17 Oktober 2014. Workshop terlaksana atas kerja sama Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh UKP4, PATTIRO, TII dan organisasi masyarakat sipil Kamboja yaitu Transparency International (TI) Kamboja, Asosiasi Pemuda Khmer (KYA), SILAKA, The Advocacy and Policy Institute (API), and Cooperation Committee for Cambodia (CCC) serta didukung oleh Ford Foundation, Asia Development Bank (ADB), dan Open Society Foundation's South East Asia Initiative (OSF SEAI). Workshop di Kamboja ini juga dihadiri organisasi masyarakat sipil Vietnam yang dikoordinasi oleh Toward Transparency Vietnam. Perwakilan dari pemerintah Kamboja yang adalah beberapa anggota parlemen, Undersecretary of State Ngan Chamroeun yang juga merupakan Wakil Kepala Komite Nasional untuk Sekretariat Pembangunan Demokrasi Daerah (NCDDSD).

Selanjutnya adalah workshop di Papua Nugini pada 27-28 November 2014. Kegiatan ini dikordinasikan secara bersama-sama oleh Institute of National Affairs (INA), TI Papua New Guinea, UKP4, PATTIRO, TII, dan OGP Support Unit. Hadir dalam acara ini dari Kementerian Luar Negeri dan berbagai lembaga pemerintah lainnya, perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Papua Nugini dan Indonesia, termasuk Komite Pengarah OGP, perwakilan dari media, perwakilan dari berbagai kedutaan besar, seperti Kedutaan Besar Selandia Baru, Inggris, dan Indonesia.

G. Pengembangan ICT Untuk Transparansi

Salah satu dukungan penting untuk transparansi informasi adalah teknologi informasi (Information and Communication Technology/ICT). Penggunaan ICT akan mempermudah akses terhadap informasi tanpa terkendala oleh jarak dan waktu. Salah satu inovasi yang dikembangkan PATTIRO adalah Peta Keterbukaan Informasi Publik (Peta KIP), suatu aplikasi yang menggambarkan kondisi keterbukaan informasi di daerah, yang meliputi: provinsi, kabupaten dan kota yang tersebar seluruh wilayah Indonesia. Aplikasi ini berbasis Geographical Information System (GIS), di mana data yang ditampilkan langsung mengacu pada lokasi daerah dalam peta Indonesia dan ter-*update* secara berkala serta dapat dipantau secara online. Peta ini menjangkau tiga entitas yaitu: Komisi Informasi Provinsi, badan publik pemerintah tingkat provinsi, dan badan publik pemerintah tingkat kabupaten/kota. Penyusunan indikator pada Peta KIP didasarkan pada isi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Aplikasi ini dikembangkan dan dikola secara kolaboratif antara FOINI dan PATTIRO bersama dengan pemerintah yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Komisi Informasi. Pemanfaatan aplikasi ini antara lain untuk memantau kondisi keterbukaan informasi di daerahnya dan dapat diakses dengan mengunjungi <http://gis.petakip.org/gispatial/map.phtml>. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada <http://petakip.org>.

Sebelumnya, kami juga telah mengembangkan aplikasi bernama Sistem Informasi Publik – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID). Aplikasi SIP PPID ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah memberikan pelayanan informasi dan mengkonsolidasikan dokumen dan penyebarannya kepada masyarakat. Aplikasi SIP PPID ini terus disempurnakan. Melalui aplikasi ini, permohonan informasi dapat dilakukan secara online sehingga menghemat waktu dan biaya. Publik dapat mengakses secara langsung informasi yang sudah dinyatakan terbuka dalam Daftar Informasi Publik (DIP). Pemerintah Daerah juga merasakan manfaat, pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik yang lebih mudah, hemat dan efisien. Melalui aplikasi SIP PPID ini, pengelolaan dokumen diintegrasikan dengan pelayanan informasi baik secara offline maupun online; update Daftar Informasi Publik (DIP) secara otomatis; konektivitas data antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD: dinas/kantor/badan); pembuatan laporan rekap secara otomatis; serta keterhubungan dengan sistem pelaporan pelayanan informasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

H. Partisipasi pada Event Internasional

- 1. Narasumber Panel pada Forum Pelayanan Publik Perserikatan Bangsa-Bangsa 2014 di Korea Selatan.** Setiap tahun, PBB menyelenggarakan forum lintas negara dalam rangka merayakan Hari Pelayanan Publik. Pada tahun 2014, Pemberian Penghargaan, dan Perayaan Hari Layanan Publik Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The 2014 United Nations Public Service Forum, Day and Awards Ceremony*) diadakan pada tanggal 23-26 Juni 2014 di Korea Selatan. Bertemakan "Memperbaharui Tata Kelola Pemerintahan untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Rakyat", PATTIRO diundang untuk berbagi pengalaman dan proses berjalannya "Inisiatif Transformatif menuju Pemerintah Terbuka yang Berkompeten dan Berorientasi pada Pelayanan", khususnya Pengalaman Kemitraan OGP dari sudut masyarakat sipil. Nanda Sihombing, Spesialis Open Government dari PATTIRO, mendiskusikan mengapa OGP penting, sekaligus mengajak peserta berkesempatan melihat kebijakan pemerintah terbuka di Indonesia. Salah satu yang menjadi topik pembahasan serius adalah ketertarikan dari perwakilan negara lain yang memiliki pendekatan dan pemahaman yang berbeda dalam pelibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Pendekatan partisipasi dalam inisiatif OGP dirasa baru dan dianggap dapat memberikan angin segar dalam reformasi negara yang hadir.
- 2. Berpartisipasi pada International Transparency and Accountability Workshop, Washington DC, AS.** Workshop yang diselenggarakan pada 17-20 September 2014 ini merupakan inisiatif dari Professor Jonathan Fox dari American University. PATTIRO yang diwakili oleh Didik Purwandanu, Senior Program Manager menjadi salah satu pembicara untuk memaparkan pengalaman PATTIRO menjalankan sinergi antara advokasi dan pemantauan publik di nasional dan daerah.
- 3. Berpartisipasi pada The OGP Peer Exchange Workshop, The Hague Belanda. Sekitar 20 perwakilan masyarakat sipil dan Steering Committee** OGP duduk bersama di Kantor Pusat Hivos di The Hague, Belanda, 2-4 September 2014 untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran dalam mengimplementasikan OGP. Dalam pertemuan ini, PATTIRO yang diwakili oleh Danadono Sirodjudin, Senior Program Manager, menjadi salah satu pembicara pada salah satu sesi pembelajaran bagaimana tim inti CSO dalam OGP di Indonesia memandang capaian, peluang, dan tantangan implementasi inisiatif pemerintahan terbuka.

I. Pengembangan Media Promosi dan Dokumentasi Pembelajaran

1. Video Dokumenter

Dalam rangka mendiseminasikan hasil kerja dan pembelajaran kepada khalayak luas, maka telah diproduksi video dokumenter pembelajaran. Video itu mengisahkan tentang apa dan bagaimana *community center* bekerja di Kabupaten Kendal dan Kota Ambon.



Bagaimana warga mengorganisir diri agar mampu mengakses dan memanfaatkan informasi publik. Video lainnya adalah tentang Prinsip Dasar Pengecualian Informasi, yang berisi dasar-dasar bagaimana memahami informasi publik dan tata cara melakukan pengecualian informasi oleh badan publik. Kedua video itu dapat dilihat pada link: https://youtu.be/oK073vgJh_c (seri 1) dan <https://youtu.be/10eCO5JSzE> (seri 2).

Selain kedua video itu, juga telah diproduksi berbagai video pembelajaran terkait OGP yang berjumlah 59 buah. Video-video, yang berisi pemaparan dari para narasumber, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sipil, itu telah diedit dan diunggah ke YouTube.

2. Dokumen Alih Bahasa Open Government Partnership

Alih bahasa dilakukan terutama untuk menyebarluaskan informasi, konsep, pembelajaran dari negara lain agar mampu diserap oleh komunitas maupun OMS di Indonesia terutama yang bergiat di tingkat sub-nasional/daerah.



Ada empat dokumen OGP yang telah dialihbahasakan, yaitu: **(a) "Ada Apa di Rencana Aksi Nasional OGP yang Baru"**, berisi penjelasan awal tentang komitmen baru dari negara-negara yang tergabung di dalam inisiatif OGP. Dokumen ini juga menyoroti kecenderungan yang sering muncul dan beberapa contoh komitmen yang relevan. Selain itu, dokumen ini mengulas contoh-contoh komitmen penting yang dapat digunakan sebagai acuan oleh negara-negara peserta OGP; **(b)**

"Deklarasi Pemerintah Terbuka", berisi berbagai komitmen pemerintah dalam menerapkan pemerintahan terbuka di masing-masing negaranya. Dokumen ini dibacakan pada saat sebuah negara mendeklarasikan keanggotaannya di OGP; **(c) "Meningkatkan**

Pengalaman OGP", berisi cara-cara yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil untuk meningkatkan pengalaman negara mereka dalam keanggotaannya di OGP; **(d) "Ringkasan: Meningkatkan Pengalaman OGP"**, berisi cara-cara yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil di Indonesia khususnya untuk meningkatkan pengalaman dalam keanggotaannya di OGP.

3. E-Buletin

E-buletin OGP merupakan media untuk menyebarkan berbagai informasi yang berhubungan dengan perkembangan gerakan Open Government Indonesia (OGI). Sampai saat ini, telah terselesaikan satu buletin Open Government Indonesia (OGI) yang telah disebarluaskan ke komunitas OGI. Buletin dengan judul "Praktik Pemerintahan Terbuka di Indonesia" ini menceritakan perjalanan Indonesia di dalam gerakan OGP sejak awal bergabung pada tahun 2011 lalu hingga saat ini. Edisi pertama dapat disimak melalui tautan: http://issuu.com/pattiro/docs/buletin_ogp_1



4. Kalender OGP Tahun 2015.



Kalender bertema OGP ini dibagikan kepada mitra kerja dan jaringan serta berbagai Organisasi Masyarakat Sipil lainnya.

5. Flask Disk OGP

Flask Disk OGP diproduksi untuk menyebarkan materi OGP sekaligus cendramata kegiatan. Dalam berbagai kesempatan, flash disk dibagikan kepada mitra-mitra, jaringan OGP dan berbagai Organisasi Masyarakat Sipil lainnya.





Tabel 1. Artikel Pemberitaan

No.	Kegiatan	Judul	Bahasa	English
1.	Lokakarya OGP Malaysia, 13 Oktober 2014	Sekilas tentang #OGPinMalaysia	http://pattiro.org/2014/11/sekilas-tentang-ogpin-malaysia/?lang=id	http://pattiro.org/2014/11/an-overview-of-og-pinmalaysia/
2.	Lokakarya OGP Kamboja, 16-17 Oktober 2014	Sekilas tentang #OGPinCambodia	http://pattiro.org/2014/12/sekilas-tentang-ogpin-cambodia/?lang=id	http://pattiro.org/2014/12/an-overview-of-og-pincambodia/
3.	Lokakarya OGP Papua Nugini, 27-28 November 2014	Sosialisasi Pemerintahan Terbuka ke Papua Nugini: ...	http://pattiro.org/2014/12/sosialisasi-pemerintahan-terbuka-ke-papua-nugini-tindak-lanjut-indonesia-terhadap-konferensi-pemerintahan-terbuka-di-bali/?lang=id	http://pattiro.org/2014/12/ogp-outreach-to-papua-new-guinea-indonesia-follows-up-on-ogp-bali-conference/
4.	Lokakarya OGP Myanmar, 19-20 Januari 2015	Lokakarya OGP di Myanmar, Babak Baru Demokrasi ...	http://pattiro.org/2015/02/lokakarya-ogp-di-myanmar-babak-baru-demokrasi-myanmar/?lang=id	http://pattiro.org/2015/02/ogp-asia-pacific-outreach-new-chapter-of-myanmar-democracy-2/
5.	Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka, Jakarta, 19-20 November 2014	Konsolidasi Nasional: Perkembangan OGP di Indonesia	http://pattiro.org/2015/02/konsolidasi-nasional-perkembangan-ogp-di-indonesia/?lang=id	http://pattiro.org/2015/01/national-consolidation-day-for-cso-ogp-development-in-indonesia/

6.		Konsolidasi Nasional Masyarakat Sipil dan Kelembagaan Partisipasi untuk Pemerintahan Terbuka	http://pattiro.org/2015/02/konsolidasi-nasional-masyarakat-sipil-dan-kelembagaan-partisipasi-dalam-konteks-demokrasi-untuk-pemerintahan-terbuka/?lang=id	http://pattiro.org/2015/02/open-government-partnership-national-consolidation-day/
7.	Rilis Media Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)	SIARAN PERS FOINI: Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres	http://pattiro.org/?p=2195	
8.		PATTIRO: Transparansi PEMDA Masih Rendah, Tantangan Bagi Pemerintah Baru	http://pattiro.org/?p=2192	
9.		FOINI: Berkinerja Rendah, Komisi Informasi (KI) Hambat Implementasi UU KIP	http://pattiro.org/?p=2190	
10.		FOINI: UU ORMAS Ancam Transparansi	http://pattiro.org/?p=2187	
11.	Pemberitaan Kegiatan Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)	Perluas Simpul Jaringan, FOINI SulSel Bentuk Koalisi Bersama Masyarakat Makassar	http://pattiro.org/?p=2181	http://pattiro.org/?p=2184



Tabel 2. Dokumentasi Foto yang Dihasilkan

No.	Kegiatan	Tautan
1.	Lokakarya Kemitraan Pemerintahan Terbuka - Tingkat Sub Nasional di Medan, Sumatera Utara, 19-21 Agustus 2014	https://picasaweb.google.com/107229946967187537015/WilayahBaratOG-PRegionalWorkshop?authuser=0&feat=directlink
2.	Lokakarya Kemitraan Pemerintahan Terbuka - Tingkat Sub Nasional di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 19-21 Agustus 2014	https://picasaweb.google.com/107229946967187537015/WilayahTengahOG-PRegionalWorkshop?authuser=0&feat=directlink
3.	Lokakarya Kemitraan Pemerintahan Terbuka - Tingkat Sub Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, 19-21 Agustus 2014	https://picasaweb.google.com/107229946967187537015/WilayahTimurOG-PRegionalWorkshop?authuser=0&feat=directlink
4.	Konsolidasi Nasional Organisasi Masyarakat Sipil Pemerintahan Terbuka di Jakarta, 19-20 November 2014 #Konsolidasi Nasional CSO - OGP 2014	https://picasaweb.google.com/107229946967187537015/KonsolidasiNasionalCSOOGP201402?authuser=0&feat=directlink
5.	Konsolidasi Nasional Organisasi Masyarakat Sipil Pemerintahan Terbuka di Jakarta, 19-20 November 2014 # The Actors	https://picasaweb.google.com/107229946967187537015/TheActors02?authuser=0&feat=directlink
6.	Open Government Partnership Asia Pacific Outreach in Malaysia, 13 Oktober 2014	https://picasaweb.google.com/107229946967187537015/OGPinMalaysia02?authuser=0&feat=directlink
7.	Open Government Partnership Asia Pacific Outreach in Kamboja, 16-17 Oktober 2014	https://picasaweb.google.com/107229946967187537015/OGPinCambodiaOGPKh02?authuser=0&feat=directlink
8.	Open Government Partnership Asia Pacific Outreach in Papua Nugini, 27-28 November 2014	https://picasaweb.google.com/107229946967187537015/OGPinPNG?authuser=0&feat=directlink
9.	Open Government Partnership Asia Pacific Outreach in Myanmar, 19-20 Januari 2015	https://picasaweb.google.com/107229946967187537015/OGPinMyanmar?authuser=0&feat=directlink

Tabel 3. Video Dokumentasi yang Dihasilkan

No.	Kegiatan	Judul	Tautan	Jml Pengunjung
1.	Lokakarya Kemitraan Pemerintahan Terbuka Medan, 19-21 Agustus 2014	#OGPWilayahBarat - Pembahasan Rencana Strategi	https://www.youtube.com/watch?v=5xw-JQm4pcSU	10 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
2.		#OGPWilayahBarat - Beberapa Indikator untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat	https://www.youtube.com/watch?v=aEH-sBO-HeOQ	20
3.		#OGPWilayahBarat - Cuplikan Presentasi Danardono Sirajudin (PATTIRO)	https://www.youtube.com/watch?v=dB5DN-TUdzK8	29 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
4.		#OGPWilayahBarat - Audiensi CSO dengan Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara	https://www.youtube.com/watch?v=iJ-mUmTCp2L4	42
5.		#OGPWilayahBarat - Tantangan CSO Indonesia dalam OGP	https://www.youtube.com/watch?v=0ae-Ph5UQLEc	31 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
6.		#OGPWilayahBarat - OGP untuk Indonesia yang Lebih Baik	https://www.youtube.com/watch?v=1gH-44i9nXzg	29
7.	Lokakarya Kemitraan Pemerintahan Terbuka Makassar, 19-21 Agustus 2014	#OGPWilayahTimur - Sekilas Tentang OGP	https://www.youtube.com/watch?v=PI1DrdzH-4qA	22
8.		Diskusi #OGPWilayahTimur	https://www.youtube.com/watch?v=y37SznBbH-KY	26 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en

No.	Kegiatan	Judul	Tautan	Jml Pengunjung
9.	Konsolidasi Nasional Organisasi Masyarakat Sipil Pemerintahan Terbuka, 19-20 November 2014	#OMSOGI214 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Pleno I - Tara Hidayat	https://www.youtube.com/watch?v=8a7Puy7J-dX8	86 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
10.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Pleno I - Luthfi Andi Mutty	https://www.youtube.com/watch?v=v2NVE-ONEkh4	52
11.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Pleno I - Sugeng Bahagijo	https://www.youtube.com/watch?v=p-PC7YU1pKQs	29 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
12.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Diskusi Pleno I - Tara Hidayat	https://www.youtube.com/watch?v=_nqEb-ch1BB8	29
13.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Diskusi Pleno I - Luthfi A. Mutty	https://www.youtube.com/watch?v=XXx-u7vv6Gp8	34 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
14.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Diskusi Pleno I - Sugeng Bahagijo	https://www.youtube.com/watch?v=-427PKE-bRuo	12

No.	Kegiatan	Judul	Tautan	Jml Pengunjung
15.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Pleno II (FULL)	https://www.youtube.com/watch?v=ZiVBt-P7KlNk	22 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
16.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Pleno II – Askhalani	https://www.youtube.com/watch?v=bg-moTXpHykY	28
17.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Pleno II - Muhammad Akil	https://www.youtube.com/watch?v=3yrl0Nd2twl	25 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
18.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Pleno II - Maryati A. Noen	https://www.youtube.com/watch?v=p-wP65-zu_Fc	20
19.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Pleno II - Danardono Sirajudin	https://www.youtube.com/watch?v=3vUR-7wj9hSk	36 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
20.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Diskusi Pleno II	https://www.youtube.com/watch?v=WF-dH8Wycans	17

No.	Kegiatan	Judul	Tautan	Jml Pengunjung
21.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Pleno III	https://www.youtube.com/watch?v=iQZngB-DSRo	8 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
22.		#OMSOGI2014- Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014-Presentasi Pokja Parlemen & Parpol	https://www.youtube.com/watch?v=Mit-Fa7wgLI0	23
23.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Presentasi Pokja Pembangunan Desa	https://www.youtube.com/watch?v=nVnEx-N1HuHU	37 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
24.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Presentasi Pokja Pelayanan Publik	https://www.youtube.com/watch?v=k-JP92Np1WR0	31
25.		#OMSOGI2014- Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014-Presentasi Pokja Anggaran & Perpajakan	https://www.youtube.com/watch?v=oUPor-NoiGik	15 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en

No.	Kegiatan	Judul	Tautan	Jml Pengunjung
26.		#OMSOGI2014- Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014-Presentasi Pokja Hukum&Peradilan	https://www.youtube.com/watch?v=0Rk9Nse_y08	25
27.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Presentasi Pokja Lingkungan & SDA	https://www.youtube.com/watch?v=wNK-mEvxKjls	20 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
28.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Pleno IV - Ilham Saenong	https://www.youtube.com/watch?v=6OzXG-264Pas	18
29.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Pleno IV - Ahmad Faisol	https://www.youtube.com/watch?v=wXT1P-jvor8o	26 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
30.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Pleno IV - Astrid Debora	https://www.youtube.com/watch?v=-pHo8SwbP1GI	23
31.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Sesi Diskusi Pleno IV	https://www.youtube.com/watch?v=Otrqm-dE-JAw	22 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en

No.	Kegiatan	Judul	Tautan	Jml Pengunjung
32.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Pemaparan Skema - Wandy Tuturoong	https://www.youtube.com/watch?v=qlcAOcp_9Uk	16
33.		#OMSOGI2014 - Konsolidasi Nasional OMS Pemerintahan Terbuka 2014 - Sesi Diskusi Skema Working Group	https://www.youtube.com/watch?v=VMR-8cl3JjDc	14 http://pattiro.org/?p=4162&lang=en
34.	Open Government Partnership Asia Pacific Outreach In Kamboja, 16-17 Oktober 2014	#OGPKh - Opening Remarks by Soeung Saroeun, CCC, #OG-PinCambodia	https://www.youtube.com/watch?v=WZ5e-22Ui7ew	98
35.		#OGPKh - Opening Remarks - Keynote Speech by Richard Bon Moya, #OGPin-Cambodia	https://www.youtube.com/watch?v=WM-3wFn5LToU	69
36.		#OGPKh - Opening Remarks by Alexander Irwan, Ford Foundation, #OG-PinCambodia	https://www.youtube.com/watch?v=1ioyle3ajS0	41
37.		#OGPKh - Opening Remarks by Ilham Saenong, CSO OGP Indonesia (TII), #OGPinCambodia	https://www.youtube.com/watch?v=mdjYR-g9l6LI	33
38.		#OGPKh - Closing Remarks by Soeung Saroeun, CCC, #OG-PinCambodia	https://www.youtube.com/watch?v=WXv3B-wTyHc4	33

No.	Kegiatan	Judul	Tautan	Jml Pengunjung
39.		#OGPKh - Closing Remarks - Keynote Speech by Richard Bon Moya, #OGPin-Cambodia	https://www.youtube.com/watch?v=wz5RX-1jhos8	51
40.		#OGPKh - Closing Remarks by Haidy Ear Dupuy, ADB, #OGPinCambodia	https://www.youtube.com/watch?v=yX-TzU-sdAgI	21
41.		#OGPKh - Closing Remarks by Ngan Chamroeun, #OG-PinCambodia	https://www.youtube.com/watch?v=Hkdd-foaKZR8	23
42.	Open Government Partnership Asia Pacific Outreach In Papua Nugini, 27-28 November 2014	#OGPinPNG - Opening Remarks by Lawrence Stephen	https://www.youtube.com/watch?v=JWHc-qOVdGhs	12
43.		#OGPinPNG - Opening Remarks by O'Conroy Dolok-saribu	https://www.youtube.com/watch?v=-E-GDS3KPHQ	22
44.		#OGPinPNG - Opening Remarks by Samson Yabon	https://www.youtube.com/watch?v=_Su8nT2fg2w	18
45.		#OGPinPNG - Opening Remarks by Sugeng Bahagijo	https://www.youtube.com/watch?v=c-OVu5-uKCCY	13
46.		#OGPinPNG - Opening Remarks by Dadang Trisa-songko	https://www.youtube.com/watch?v=hoTTY-Jce1Fg	26
47.		#OGPinPNG - Closing Remarks by Lawrence Stephen	https://www.youtube.com/watch?v=WUjzf-NlcX9M	7

No.	Kegiatan	Judul	Tautan	Jml Pengunjung
48.		#OGPinPNG - Closing Remarks by O'Conroy Dolok-saribu	https://www.youtube.com/watch?v=Uqi-kuj_KuYs	11
49.		#OGPinPNG - Closing Remarks by H.E Rimbink Pato	https://www.youtube.com/watch?v=Je-9faZSfjvQ	13
50.		#OGPinPNG - Closing Remarks by Suzanne Nazal	https://www.youtube.com/watch?v=HtZ-rQM4ew0c	10
51.	Open Government Partnership Asia Pacific Outreach In Myanmar, 19-20 Januari 2015	#OGPinMyanmar - Opening Remarks by Daw Pansy Tun Thein	https://www.youtube.com/watch?v=vW-1zwoLfOWs	21
52.		#OGPinMyanmar - Opening Remarks by Derek J. Mitchell	https://www.youtube.com/watch?v=YqkA-koHUC7U	14
53.		#OGPinMyanmar - Opening Remarks by Paul Maassen	https://www.youtube.com/watch?v=ojewK-OmGhuQ	16
54.		#OGPinMyanmar - Opening Remarks by Raden Siliwanti	https://www.youtube.com/watch?v=1D7is-ecKn6Q	13
55.		#OGPinMyanmar - Introduction to Open Government Partnership by Paul Maassen	https://www.youtube.com/watch?v=LMshuuqy12I	15
56.		#OGPinMyanmar - Introduction to IRM by Malou Mangahas	https://www.youtube.com/watch?v=1hFz-soDQm4g	7
57.		#OGPinMyanmar - Lesson Learnt From Indonesia by Dadang Trisasongko	https://www.youtube.com/watch?v=MIs-jlD_aHzl	13
58.		#OGPinMyanmar - Closing Remarks by Nwe Zin Win (in Burmese)	https://www.youtube.com/watch?v=24i016B-feMw	10



Pembelajaran Mengawal Implementasi UU KIP

No.	Kegiatan	Judul	Tautan	Jml Pengunjung
59.		#OGPinMyanmar - Closing Remarks by Raden Siliwanti	https://www.youtube.com/watch?v=HCK-wKuPtDPk	15

Undang-Undang KIP dapat dikatakan sebagai salah satu terobosan untuk mentransformasikan pemerintahan yang tertutup menjadi pemerintahan yang terbuka. Tujuan akhir (*goal*) UU KIP sendiri adalah penyelenggaraan negara yang baik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk sampai ke tujuan tersebut, dampak antaranya adalah adanya partisipasi dan akuntabilitas. Namun dalam implementasinya, hal ini tidak dengan mudah dipahami dan direalisasikan oleh badan publik, terutama pemerintah, di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini terutama terkait dengan pandangan para pejabat badan publik, bahwa informasi yang dikuasai merupakan domainnya dan sebagian dianggap sebagai rahasia. Karena itu, mendorong badan publik membuka informasi merupakan tahap awal yang harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Tiago Peixoto (2012),⁵ bahwa keterbukaan informasi merupakan rantai penting untuk terjadinya akuntabilitas, yang diawali dengan (1) adanya keterbukaan dalam informasi pemerintah; selanjutnya (2) informasi yang dibuka sampai kepada publik yang dituju; setelah itu (3) masyarakat dapat memproses informasi yang dibuka dan bereaksi terhadapnya; dan (4) pejabat publik merepon reaksi publik atau dikenakan sanksi oleh publik melalui cara-cara yang institusional.

Keterbukaan informasi atau transparansi ini juga menjadi indikator penting terwujudnya demokrasi. Dalam Memorandum-nya pada bulan Januari 2009, sesaat setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menyatakan bahwa “*a democracy requires accountability, and accountability requires transparency*”. Di AS sendiri, UU Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act/FOIA) yang sudah diterapkan sejak tahun 1966 memang dimaksudkan agar warga negara dapat menguasai informasi sebagai suatu masyarakat demokratis, memerangi korupsi dan memastikan pemerintah akuntabel terhadap rakyatnya (Jennifer Shkabatur, 2012).⁶

Kilas Balik Kontribusi PATTIRO Mempromosikan Isu Transparansi (2000-2015)

Tahap 1: 2000-2006

Jejak keterlibatan PATTIRO dalam isu transparansi/keterbukaan informasi publik dimulai dengan terlibat dalam Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) pada tahun 2000. Koalisi ini memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi. Isu transparansi ini juga mendapatkan dukungan dari lembaga World Bank, terutama di 14 kabupaten/kota melalui dukungan dalam menyiapkan

5 Peixoto, Tiago. The Uncertain Relationship Between Open Data and Accountability: A Response to Yu and Robinson's The New Ambiguity of "Open Government". UCLA Law Review Discourse, 60 (2012), hal. 203.

6 Shkabatur, Jennifer, Transparency With(out) Accountability: Open Government in the United States (March 25, 2012). Yale Law & Policy Review, Vol. 31, No. 1, 2013. hal. 13

perangkat kebijakan yang transparan.⁷

Di Kabupaten Lebak, salah satu wilayah kerja PATTIRO, masyarakat sipil dan pemerintah daerah telah berhasil mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Transparansi pada tahun 2004. Di sisi lain, PATTIRO memfasilitasi penguatan masyarakat/kelompok warga (*Community Center/CC*) untuk mengakses dan memanfaatkan informasi publik. Tahapan dimulai dari mengenalkan kekuatan informasi, menggunakan hak memperoleh informasi publik, mengidentifikasi permasalahan di sekitar yang dialami sehari-hari, mengkonversi permasalahan dengan jenis informasi yang dibutuhkan, mengajukan informasi kepada badan publik, dan mengkonversi informasi menjadi manfaat langsung maupun memanfaatkan informasi menjadi materi advokasi perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan. Inovasi di Kabupaten Lebak ini, juga dilakukan di Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Pekalongan pada 2006-2007.

Tahap 2: 2007-2008



Pada tahap kedua, tahun 2007-2008, kami mulai fokus pada kesiapan badan publik dalam memberikan pelayanan informasi publik. Jika sebelumnya berfokus pada penguatan kelompok warga (CC) dalam memanfaatkan informasi publik, pada tahap kedua ini masyarakat difasilitasi untuk melakukan uji akses (permintaan informasi) kepada badan publik. Hal ini dilakukan di Kota Serang, Banten dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Uji akses merupakan interaksi antara masyarakat dan badan publik yang semestinya transparan. Inovasi ini juga untuk mencari model/prototipe infrastruktur keterbukaan informasi pada badan publik, sekaligus memastikan model

pemanfaatan informasi oleh masyarakat melalui dialog dan aktivitas lain untuk akuntabilitas pelayanan informasi. Sejumlah inovasi ini dikembangkan dalam suasana advokasi masyarakat sipil untuk lahirnya kebijakan nasional yang menjamin hak masyarakat atas informasi. Pada tahun 2008, tepatnya 30 April 2008 ditetapkan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Tahap 3: 2009-2011

Pada tahap ketiga ini, kami fokus pada penguatan badan publik dalam membangun sistem pelayanan informasi publik, sekaligus implementasi UU KIP. Strategi kami, lebih difokuskan untuk: pembentukan Pejabat Pengelola

⁷ Melalui Program Initiative for Local Governance Reform (ILGR).

Informasi dan Dokumentasi (PPID); pendampingan untuk penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Pelayanan Informasi; pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi dan Daftar Informasi Publik (DIP); serta Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi.

Pada tahap ini juga kami mengembangkan infrastruktur akuntabilitas pelayanan informasi dengan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi untuk pembentukan Komisi Informasi Provinsi, penguatan kelembagaan, serta penguatan komisioner menjalankan fungsi mediasi dan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa informasi. Pendampingan ini terutama dilakukan di Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Tengah.

Bagi PATTIRO, pelaksanaan prinsip transparansi, sebagaimana dimandatkan UU KIP, dilaksanakan dalam dua tujuan besar yaitu perbaikan pelayanan publik seperti yang dipaparkan di atas, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan badan publik. Sejumlah pencapaian penting peningkatan akuntabilitas badan publik dihasilkan dari penguatan masyarakat dalam menganalisis anggaran publik, penyebarluasan anggaran publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dilaksanakan di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Magelang mulai tahun 2006.⁸ Secara spesifik, kami juga mendorong sistem transparansi dan akuntabilitas pada tiga program bantuan sosial, yaitu: Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Pupuk Bersubsidi bagi Petani, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 10 kabupaten/kota pada tahun 2010-2012.⁹

Tahap 4: 2012-2014

Implementasi UU KIP Secara Masif

Meski UU KIP telah berlaku efektif selama hampir lima tahun, namun belum semua badan publik menunjukkan kesiapan mengimplementasikannya. Sebagian badan publik terutama di daerah masih belum membentuk PPID atau menyusun sistem dan SOP pelayanan informasi. Sebagian yang lain masih menganggap pelayanan informasi sebagai beban tambahan. Pada sisi yang lain, masyarakat masih belum memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan haknya dalam mengakses informasi publik.

Berbasiskan pengalaman di atas, pada tahun 2012-2014 PATTIRO

8 Melalui Program *Participatory Budgeting Expenditure Tracking* (PBET) yang dilaksanakan PATTIRO bekerjasama dengan World Bank, National Democratic International (NDI) dan sejumlah Jaringan LSM pada tahun 2006-2008.

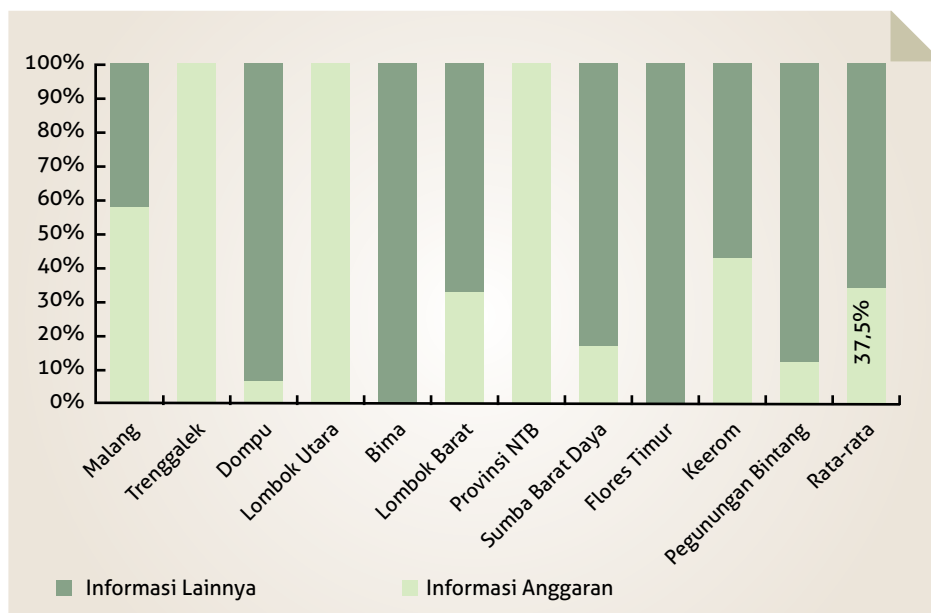
9 Skema ini dilaksanakan melalui Program *Strengthening Integrity and Accountability Program* Phase 2 (SIAP 2), yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam); Kota Serang (Provinsi Banten), Kabupaten Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat), Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surakarta (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Gresik (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Lombok Barat (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Jeneponto (Provinsi Sulawesi Selatan), dan Kota Jayapura (Provinsi Papua).

mengembangkan skema terpadu dalam implementasi UU KIP secara masif, meliputi: penguatan kapasitas masyarakat melalui pendampingan terhadap kelompok warga (community center/CC); penguatan badan publik; fasilitasi pembentukan dan penguatan Komisi Informasi Provinsi; dukungan kepada badan publik di tingkat pusat (Komisi Informasi dan Kemendagri) dalam pembuatan panduan pelaksanaan UU KIP; serta memfasilitasi jaringan FOINI melalui optimalisasi peran Sekretariat FOINI dan memfasilitasi implementasi OGP melalui peran Sekretariat Tim Inti Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.

Penjelasan mengenai aktifitas terkait skema dimaksud sudah dipaparkan pada bagian “Fokus Area Transparansi”.

Gambar 1:
Kecenderungan
Permintaan Informasi
oleh Masyarakat
(Informasi Perbaikan
Pelayanan Publik vs
Informasi Anggaran)

Sumber: diolah dari Program
Community Access to Information,
PATTIRO, Januari 2014



Pembelajaran (*Lesson Learned*)

Dalam mengimplementasikan UU KIP ini, PATTIRO menghadapi berbagai fakta dan dinamika di lapangan yang dapat menjadi pembelajaran penting. Pembelajaran ini terutama menyangkut bagaimana melakukan penguatan kapasitas di tingkat warga dan pemerintah. Dalam arti pemerintah mau membuka informasi kepada publik dan warga aktif meminta informasi publik yang dibutuhkan; mendorong pembentukan dan melakukan penguatan kapasitas kepada Komisi Informasi Provinsi; serta manfaat yang diperoleh dari keterbukaan informasi itu baik bagi pemerintah sendiri maupun bagi masyarakat.

a. Pada tingkat Masyarakat

Sejak Indonesia merdeka, masyarakat terbiasa berada dalam situasi tertutup informasi. Badan publik yang tidak menyampaikan informasi dipandang sebagai hal yang wajar dan biasa. Informasi publik dipandang

bukan urusannya dan tidak terkait dengan kehidupannya.

Upaya PATTIRO mempromosikan pentingnya transparansi dengan memberikan pemahaman kepada warga melalui wadah CC telah menghasilkan beberapa perubahan di tingkat masyarakat. Perubahan itu berupa munculnya kesadaran untuk meminta informasi publik dan mengkonversi informasi publik menjadi manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh warga masyarakat.

Bila dicermati lebih lanjut, kebutuhan masyarakat akan informasi publik cenderung mengarah kepada jenis informasi yang mampu mengungkit peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan pelayanan publik. Pada tingkat tertentu, masyarakat mulai membutuhkan jenis informasi yang mengungkit partisipasi dalam pembuatan keputusan publik. Sementara pada kelompok warga yang telah terpenuhi pelayanan dasarnya, mulai membutuhkan jenis informasi yang mengungkit akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, penguatan kelompok masyarakat (CC) dipilih oleh PATTIRO sebagai strategi untuk memberikan tekanan kepada badan publik (penyelenggara urusan negara) agar transparan terhadap informasi yang dikuasai dan membangun kolaborasi dengan masyarakat melalui dialog dan forum akuntabilitas lainnya.

Dari pengalaman pendampingan CC tersebut, terlihat bahwa **CC cukup efektif sebagai sarana pusat pembelajaran warga terkait transparansi**. Upaya edukasi kepada masyarakat mengenai hak atas informasi selama ini dijalankan oleh pegiat warga yang mendapat dukungan dari organisasi masyarakat sipil (CSO) sebagai katalisator. Mengingat keterbatasan warga dan CSO, maka proses edukasi sudah selayaknya mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari instansi pemerintah sebagai badan publik yang menyediakan dan melayani informasi.

Pembelajaran lainnya adalah bahwa **advokasi tidak dapat dilakukan secara *vis a vis*, dalam arti mempertentangkan antara pemerintah dengan masyarakat**. Pengalaman menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan dengan mempertentangkan antara pemerintah dengan masyarakat cenderung menimbulkan sikap defensif dari pejabat publik. Advokasi yang realistis dilakukan dan relatif efektif adalah dengan membangun kerjasama yang konstruktif atau biasa disebut dengan *constructive engagement*.

Selain bekerja pada tingkat warga, **membangun koalisi masyarakat sipil sebagai bagian dari katalisator keterbukaan informasi publik** juga merupakan hal yang penting dilakukan. Hal ini dilakukan melalui jaringan FOINI dan Tim Inti CSO OGP Indonesia. Pada tahun 2012, PATTIRO mendapat mandat sebagai Koordinator Nasional dan Sekretariat FOINI untuk periode 2012-2015. Diantara peran sekretariat adalah fasilitasi diskusi, untuk menggerakkan jaringan masyarakat sipil dan mendorong advokasi di daerah. FOINI sebagai sebuah jaringan juga memiliki simpul-simpul berupa organisasi masyarakat sipil di 17 provinsi. Melalui simpul-simpul ini, berbagai upaya dukungan

terhadap keterbukaan informasi publik terus dilakukan. PATTIRO sendiri memandang bekerja sama dalam jaringan memberikan kontribusi yang positif, antara lain akses terhadap kondisi atau masalah di daerah lebih mudah dijangkau dengan menggunakan simpul; sebagai mitra dalam pelaksanaan program; berbagi pengalaman keberhasilan dan hambatan dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi serta sarana konsolidasi terutama untuk advokasi di tingkat nasional.

Terkait dengan transparansi ini, pada tahun 2011, Indonesia menjadi salah satu inisiator dari inisiatif Kemitraan Pemerintah Terbuka (*Open Government Partnership/OGP*). Pada tahun 2012, PATTIRO menjadi anggota Tim Inti OGP Indonesia dari unsur CSO sekaligus menjadi Sekretariat OGP Indonesia untuk CSO.

Pada awalnya, ada resistensi dari kalangan masyarakat sipil Indonesia terutama terkait kesetaraan atas partisipasi CSO di OGP. Agenda-agenda OGP Indonesia sendiri masih belum memberikan posisi dan peran seimbang antara pemerintahan dan masyarakat sipil. Ditambah dengan isu OGP yang hanya terdengar di tingkat pemerintah pusat dan belum menyentuh substansi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama di daerah. Dalam perkembangannya resistensi tersebut mulai berganti dengan rasa kepemilikan bersama atas agenda OGP Indonesia seiring dengan perbaikan mekanisme dan tata kelola relasi CSO dan pemerintah pada tahun 2012.

Sebagai negara dengan model desentralisasi, pola OGP ini memang semestinya dipraktikkan pada tingkat sub nasional (provinsi/kabupaten/kota). Sejumlah identifikasi dan upaya piloting dilakukan namun juga belum menemukan pola bakunya. Praktik OGP semestinya menjadi pengungkit bagi terciptanya pemerintahan terbuka yang berdampak pada upaya perbaikan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan. Upaya-upaya inovasi harus ditumbuhkan baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Inovasi-inovasi tersebut juga penting untuk direplikasi dan di-*scaling up* baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Dalam rangka mendorong kontribusi OGP yang lebih signifikan, PATTIRO melalui FOINI telah melakukan identifikasi aset berupa inisiatif dan program yang telah dilakukan oleh badan publik daerah dalam membangun pemerintahan yang transparan dan terbuka. Aset tersebut merupakan modal yang akan digunakan untuk mendorong perubahan yang lebih besar. Kami juga meyakini dengan membawa pembelajaran dan modal sosial pada skema kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui OGP akan membawa perubahan yang lebih besar. Perubahan tersebut tentu saja membutuhkan sikap pro aktif pemerintah, terutama pada informasi yang dapat menciptakan manfaat dan mendorong interaksi berkelanjutan antara pemerintah dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

b. Pada Badan Publik

Lebih dari 30 tahun sejak merdeka, badan-badan publik, termasuk lembaga

pemerintah, terbiasa bekerja dalam ketertutupan. Informasi yang dikumpulkan dan dikuasai dipandang hanya sebagai domain lembaganya semata, sebagian informasi malah dianggap sebagai rahasia negara. Bilapun ada pihak yang meminta informasi, hanya bisa diberikan dengan sejumlah “prasyarat”. Misalnya wartawan dan aktifis CSO yang mendapatkannya lewat “jalan belakang”; bila ada sejumlah dana yang disediakan untuk itu; atau ada perintah dari pihak yang lebih tinggi strukturnya.

Terbitnya UU KIP dapat dipandang sebagai lompatan besar dalam tata kelola badan publik, terutama pemerintah. Kami melihat, melalui implementasi UU KIP, **telah mengubah mindset “tertutup” menjadi “terbuka”**. Pada saat awal implementasi UU KIP, kami menemukan sejumlah fakta, bahwa di sebagian besar daerah, pejabat pemerintah daerah (terutama kabupaten/kota) belum memahami isi dari UU KIP yang mewajibkan seluruh badan publik, termasuk instansi pemerintah daerah wajib membuka informasi yang dikuasainya. Sehingga ketika ada permintaan informasi, muncul resistensi. Apalagi *mindset* yang terbangun selama ini adalah informasi merupakan milik pemerintah dan bahkan dianggap sebagai rahasia negara. Karena itu sosialisasi mengenai filosofi, isi dan terutama kewajiban badan publik yang diamanatkan dalam UU KIP terus dilakukan dalam rangka memberi pemahaman dan diharapkan dapat mengubah cara pikir pejabat publik terhadap informasi yang dikuasainya. Salah satu kewajiban itu adalah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Keengganan membuka informasi juga dilandasi oleh kepentingan pribadi (*vested interest*) dari pejabat publik. Seperti contoh di salah satu sekolah yang tidak mau membuka informasi tentang jumlah Bantuan Siswa Miskin, meskipun sudah diminta oleh orang tua siswa dan pegiat warga. Hal ini terjadi karena ada oknum sekolah yang memotong jumlah uang yang seharusnya diterima oleh siswa miskin tersebut. Untuk menutupi modus tersebut, oknum menyebut pegiat warga yang aktif mendorong orang tua siswa meminta informasi itu sebagai provokator.

Proses sosialisasi yang relatif masif, baik dilakukan oleh PATTIRO maupun pihak lain, terutama Kementerian Kominfo, Komisi Informasi dan lembaga lainnya tampak memperlihatkan hasil berupa munculnya semangat untuk membuka informasi dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. Namun, persoalannya menjadi lebih teknis. Sebagian besar pejabat publik, termasuk yang ditetapkan sebagai PPID tidak mengetahui cara memproduksi, mendokumentasikan dan menyusun mekanisme pelayanan informasi. Hal ini terlihat dari proses sosialisasi UU KIP di beberapa daerah di Indonesia Timur.

Meski memiliki semangat membuka informasi, namun tampak bahwa pejabat



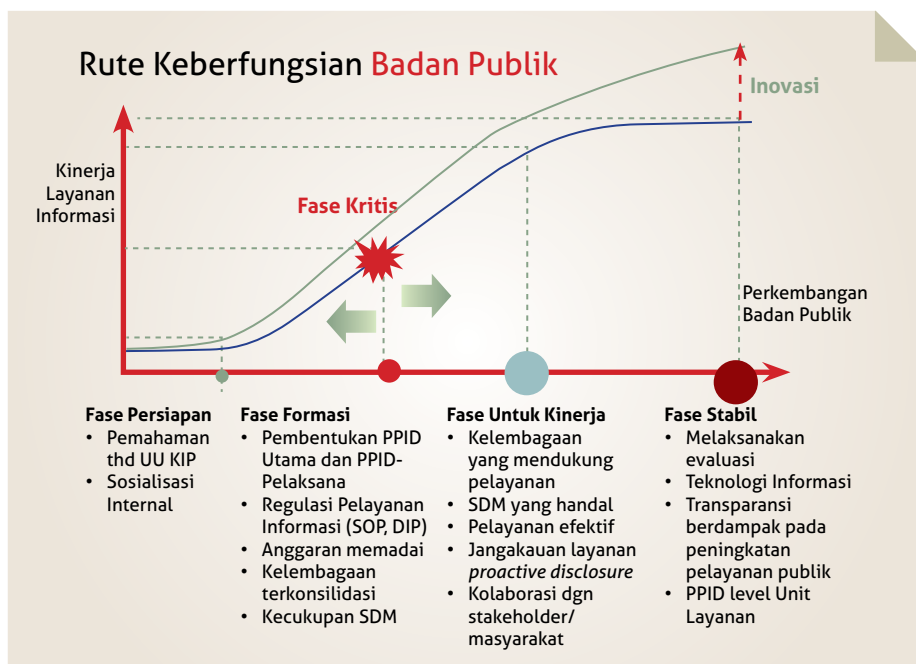
publik belum menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai faktor penting. Sehingga daftar informasi publik yang dibuka belum mencerminkan kebutuhan masyarakat, dalam arti jenis-jenis informasi yang dibutuhkan masyarakat belum semuanya disediakan. Yang terlihat adalah “yang penting dibuka dulu informasinya”, tanpa mempertimbangkan apakah informasi itu dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Namun jelas ini merupakan satu kemajuan dalam perubahan *mindset* pejabat publik di Indonesia.

Pembelajaran berikutnya adalah bahwa **penghargaan (award) cukup efektif memotivasi pemerintah daerah dan pusat mengimplementasikan UU KIP.**

Semangat untuk membuka informasi ini kemudian meningkat setelah adanya dorongan dari Komisi Informasi dan Kementerian Dalam Negeri berupa Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP Award). Badan-badan publik, terutama instansi pemerintah pusat dan daerah berlomba untuk membuka informasi dan menampilkan mekanisme pelayanan informasi yang paling mutakhir. Beberapa daerah dengan dukungan dari masyarakat sipil berhasil meningkatkan kualitas pemberian pelayanan informasi, terutama dengan menggunakan dukungan teknologi informasi. Dari daerah yang mendapatkan award, teridentifikasi bahwa efektifitas fungsi PPID, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, meliputi: (a) komitmen pimpinan daerah, (b) kapasitas PPID dalam memahami peraturan perundangan terkait KIP, (c) keterampilan PPID dalam mengelola dan melayani permohonan informasi publik, dan (d) dukungan sarana pendukung untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Pembelajaran lainnya adalah **permintaan informasi dari warga penting untuk mengefektifkan layanan informasi badan publik.** Semangat memperbaiki mekanisme pelayanan informasi ini ternyata tidak cukup bila hanya dilakukan di tingkat badan publik. Sosialisasi kepada masyarakat

Gambar 2. Rute Keberfungsian Badan Publik dalam KIP



Kolaborasi
CSO dan Pemerintah
Dalam Mendorong
Transparansi dan
Akuntabilitas
di Indonesia

mengenai hak-haknya dalam memperoleh informasi, cara mengakses informasi dan jenis-jenis informasi yang bisa diakses di badan publik menjadi sangat penting. Tanpa masyarakat mengetahui hal-hal tersebut, maka proses interaksi (meminta dan melayani informasi) tidak terjadi. Dengan kata lain terjadi ketiadaan/kekurangan permintaan informasi (*lack of demand of public information*). Hal ini sudah terbukti di DKI Jakarta, yang sudah menggunakan teknologi informasi yang relatif canggih, dan daftar informasi publik yang disediakan yang relatif lengkap, namun relatif sedikit masyarakat yang mengakses informasi, khususnya secara online melalui web.

Arah percepatan pelaksanaan UU KIP pada pemerintah daerah juga didukung oleh pemerintah pusat yang memiliki keterkaitan langsung antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Pusat, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Pada level tertentu, UKP4 memiliki tingkat pengaruh yang lebih intensif kepada kementerian dan lembaga pemerintah pusat, karena UKP4 menilai kinerja kementerian dan lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara Kementerian Dalam Negeri cukup intensif mendorong pelaksanaan peraturan pada pemerintah daerah.

Bila dikaitkan dengan keberfungsian badan publik, maka pembelajaran yang diperoleh PATTIRO dalam fasilitasi penguatan badan publik dapat dibagi dalam empat tahapan dalam rangka menuju keberfungsian badan publik yaitu: (a) Fase Persiapan, (b) Fase Formasi, (c) Fase Unjuk Kinerja, dan (d) Fase Stabil. Dari keempat fase ini, fase yang kritis terletak antara Fase Formasi dan Fase Unjuk Kinerja, yang ditandai dengan terbentuk dan mulai terkonsolidasinya badan publik, namun belum menunjukkan kinerja yang berarti. Fase ini akan mengalami kemunduran manakala tidak mendapatkan dukungan dari pimpinan badan publik dan antusias dari masyarakat. Fase kritis ini juga bisa ditimbulkan karena mutasi pegawai yang ditempatkan pada PPID, sehingga badan publik harus membangun fondasi dari awal lagi. Visualisasi perkembangan badan publik menuju keberfungsian dapat dilihat pada gambar berikut.

c. Pada Komisi Informasi

Implementasi keterbukaan informasi juga tidak bisa dilepaskan dari fungsi Komisi Informasi (KI). Melalui petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang ditetapkan KI, badan publik memiliki acuan teknis bagaimana cara menyusun, mendokumentasikan dan melayani informasi publik. Ini menjawab persoalan teknis dari sebagian besar PPID yang tidak mengetahui cara memproduksi, mendokumentasikan dan menyusun mekanisme pelayanan informasi. Fungsi KI lainnya adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Kehadiran KI merupakan jawaban bila terjadi ketidakpuasan dari masyarakat (pemohon informasi) saat meminta informasi kepada badan publik. Dengan kata lain, KI merupakan saluran akuntabilitas pelayanan informasi oleh PPID. Masyarakat

bisa mengajukan hak untuk menguji kebenaran keputusan PPID berupa penolakan atas permintaan informasi maupun pengecualian informasi yang dibuat.

Dalam konteks itu, PATTIRO mendukung kerja KI melalui fasilitasi pembentukan KI di tingkat provinsi dan penyusunan rencana kerja KI Provinsi serta peningkatan kapasitas komisioner dan staf KI Provinsi terutama dalam penyelesaian sengketa informasi.

Dari proses fasilitasi pembentukan dan penguatan KI Provinsi, ada beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil yaitu **partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan rekrutmen komisioner menjadi sangat menentukan efektifitas KI Provinsi**. Komisi Informasi merupakan lembaga baru sebagai amanat dari UU KIP. Dalam proses rekrutmen KI Provinsi, komitmen pemerintah provinsi menjadi kata kunci, di samping membutuhkan desakan dari masyarakat. Umumnya institusi politik dan atau pemerintah yang sedang berkuasa memiliki kepentingan untuk menempatkan personil yang berafiliasi dengannya. Untuk memastikan siapapun komisioner yang dipilih oleh DPRD Provinsi dapat menjalankan tugasnya, maka kandidat yang lolos dari tim/panitia seleksi harus memiliki kemampuan dan keterampilan di atas ambang minimal (*passing grade*).

Ketika proses seleksi masih berada pada tahapan tim/panitia seleksi¹⁰ calon komisioner ini, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih komisioner terbaik, dengan mengusulkan personal yang memiliki integritas untuk menjadi anggota tim seleksi; mendorong tim seleksi transparan dalam pelaksanaan setiap tahapan; mengadvokasi tim seleksi mengumumkan calon yang lolos sesuai dengan urutan penilaian; melakukan penelusuran profil atau rekam jejak (*tracking/profiling*) kepada calon yang terpilih; dan bekerjasama dengan media massa agar proses seleksi calon komisioner terpublikasi secara luas.

Setelah calon diserahkan oleh Gubernur kepada DPRD, masyarakat juga masih bisa berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan aspirasi melalui audiensi, dan menyampaikan rekam jejak calon kepada DPRD.

10 Tahapan seleksi anggota KI Provinsi dimulai dengan pembentukan Tim seleksi calon anggota KI Provinsi, yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur, berjumlah lima orang yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan unsur Komisi Informasi. Selanjutnya dimulailah tahapan seleksi yang terdiri dari: (1) Pengumuman pendaftaran; (2) Penerimaan pendaftaran; (3) Penerimaan dokumen pendaftaran; (4) Seleksi administratif; (5) Seleksi tertulis; (6) Penerimaan masukan dan saran masyarakat; (7) Penulisan makalah; (8) Test dinamika kelompok; (9) Wawancara; (10) Pengajuan nama calon anggota KI Provinsi. Dari hasil berbagai tahapan seleksi tsb, Tim seleksi mengajukan 10-15 nama calon kepada Gubernur. Gubernur lalu mengajukan nama-nama tsb kepada DPRD Provinsi untuk dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*); (11) Uji kepatutan dan kelayakan. Dari hasil uji tsb, DPRD menetapkan peringkat 1-5 calon anggota KI, yang kemudian ditetapkan oleh gubernur sebagai anggota KI Provinsi. (Selengkapnya lihat pada menurut Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KI Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lampiran Keputusan Ketua KI Pusat RI No.01/KEP/KIP/III/2010)

Dukungan Pemerintah Provinsi menjadi salah satu faktor penentu efektifitas KI Provinsi. Dukungan ini terutama alokasi dana operasional, sekretariat dan kegiatan KI Provinsi. Karena itu, desakan agar pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran yang memadai bagi KI provinsi penting dilakukan, meski harus diwaspadai munculnya gejala permintaan anggaran yang besar tanpa disertai target kinerja. Anggaran yang besar ini dapat dimanfaatkan untuk menambah kasus-kasus "sengketa informasi buatan" dengan tujuan memperbanyak perjalanan dinas penyelesaian sengketa informasi. Kondisi ini juga perlu diantisipasi karena bisa menimbulkan efek negatif bagi implementasi UU KIP di daerah. Kasus "sengketa informasi buatan" ini modusnya adalah ada anggota masyarakat didorong oleh komisioner untuk meminta informasi yang relatif sensitif, yang berpeluang besar ditolak oleh badan publik. Setelah itu otomatis akan disengketakan. Sehingga ada alasan bagi komisioner KI untuk menggunakan dana operasional penyelesaian sengketa informasi.

d. Manfaat Keterbukaan Informasi Publik

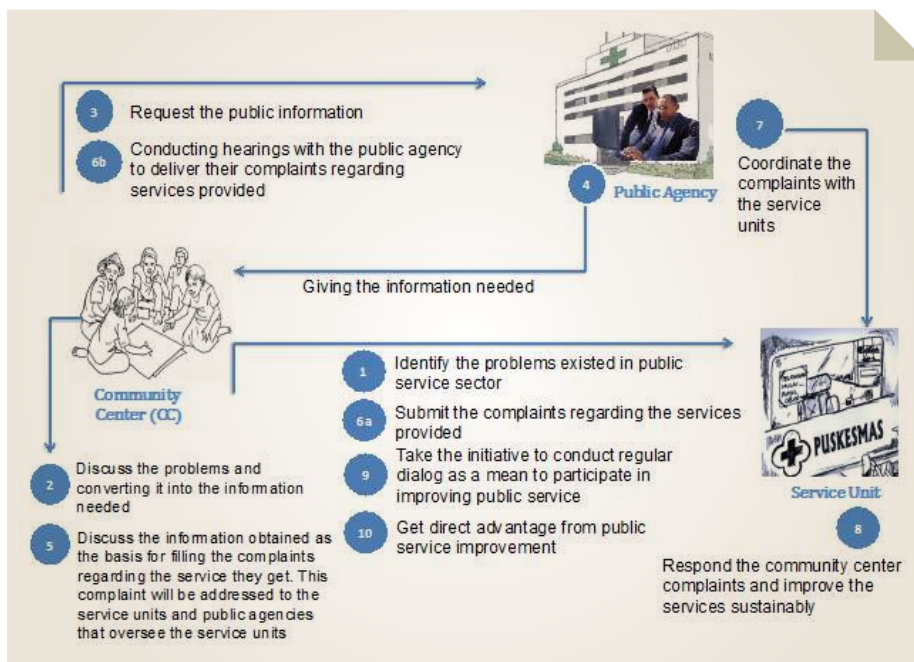
Salah satu pertanyaan penting dari implementasi keterbukaan informasi publik adalah manfaat apa yang diperoleh baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi pemerintah? Bila dianalisis lebih rinci, keterbukaan informasi sejatinya memberikan manfaat yang relatif signifikan kepada badan publik, salah satunya pemerintah. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat lebih banyak terpapar informasi (melek informasi) dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, keluhan atau usulan perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Warga masyarakat ini, biasanya dengan dukungan CSO, kemudian tergerak untuk menindaklanjuti informasi publik yang diperolehnya dengan memberikan usulan perbaikan pelayanan publik atau melakukan advokasi. Artinya pemerintah mendapatkan masukan yang valid dan dukungan yang signifikan untuk memperbaiki pelayanan yang diberikannya selama ini. Umpan balik dari warga masyarakat ini, bila direspon dengan positif oleh pejabat publik, akan menjadikan lembaga pemerintah lebih responsif dan tampak lebih akuntabel.

Melalui keterbukaan informasi pula, pemerintah dapat menyampaikan rencana dan program kerjanya, serta kemajuan hasil kerjanya. Pemerintah juga dapat menyampaikan keterbatasan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat memahami keterbatasan dan tantangan itu dan memunculkan empati masyarakat terhadap pemerintah. Melalui empati ini, maka sinergi pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki pelayanan publik dapat terbangun. Dampak nyata dari hal tersebut adalah terjadinya perbaikan pelayanan oleh pemerintah dan meningkatnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Bagi masyarakat, keterbukaan informasi memberikan dampak yang relatif signifikan dalam meningkatkan taraf hidupnya, terutama dikaitkan dengan

adanya perbaikan pelayanan publik, yang berdampak pada berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan oleh warga masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memperoleh insentif dari transparansi dengan syarat warga dapat mengkonversi informasi publik yang diterimanya menjadi manfaat langsung. Sebagai contoh, para orang tua siswa miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengakses informasi mengenai bea siswa ke Dinas Pendidikan dan kemudian

Gambar 3. Interaksi CC dan Badan Publik dalam Pemanfaatan Informasi



menggunakan informasi itu untuk melengkapi persyaratan memperoleh bea siswa. Demikian juga dengan di Provinsi Banten, para petani yang sulit memperoleh pupuk bersubsidi, kemudian meminta informasi mengenai pupuk bersubsidi ke Dinas Pertanian, kemudian menggunakan informasi itu untuk melengkapi persyaratan memperoleh pupuk bersubsidi.

Bila dianalisis lebih lanjut, proses masyarakat memperoleh manfaat keterbukaan informasi dapat dijelaskan sesuai dengan tahapan pembentukan dan penguatan community center (CC) dalam mengadvokasi informasi publik. PATTIRO sendiri selama ini memfasilitasi pembentukan CC dan meningkatkan kapasitas CC dalam bekerja di level masyarakat. Community center adalah forum yang beranggotakan warga masyarakat yang memiliki kepedulian atau minat terhadap isu-isu tertentu, misalnya perbaikan pelayanan publik, dan akses informasi dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Tahapan pembentukan dan penguatan CC setidaknya terdiri dari empat fase/tahap, yaitu 1) identifikasi informasi dan pemilahan informasi yang dibutuhkan; 2) pegiat CC mampu mengakses atau meminta informasi kepada badan publik; 3) pegiat CC mampu mengkonversi informasi yang

Box 1:

Membuka informasi anggaran melalui Citizen Budget

Dokumen anggaran, khususnya APBD, bukanlah dokumen yang mudah dibaca dan dipahami, apalagi oleh masyarakat awam. Selama ini dokumen yang lazim dipublikasikan adalah dokumen APBD yang menjelaskan seluruh pos anggaran dan belanja. Selain sangat tebal, juga banyak informasi yang tidak relevan atau dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Karena itu, muncullah gagasan untuk menyusun suatu dokumen anggaran yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini yang disebut anggaran warga (*citizen budget*), yang diterapkan di Kabupaten Flores Timur dan Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dokumen anggaran warga ini lebih fokus pada sektor tertentu misalnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Bentuknya antara lain poster, buku saku dan baliho. Salah satu manfaat anggaran warga adalah cara penyampaian yang lebih menarik, menggunakan lebih banyak ilustrasi, sehingga pesannya lebih mudah dicerna masyarakat awam.

Dokumen anggaran warga ini menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk membuka informasi tentang anggaran yang mudah dipahami masyarakat. Pada awalnya, anggaran warga ini diinisiasi oleh CSO, namun dalam perkembangannya kemudian diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Ngada. Model dokumennya juga terus mengalami perbaikan. Jika di awal, hanya mendeskripsikan detail per pos program, belum ada ilustrasi narasi dan gambar, serta belum menjelaskan keterwakilan perempuan. Maka pada tahun-tahun berikutnya, sudah menggunakan ilustrasi dan narasi sederhana dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan dan diadopsinya anggaran warga ke dalam media publikasi yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten.

Dokumen anggaran warga yang muncul belakangan, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih ke hasil analisis porsi anggaran di beberapa sektor, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ini turut berdampak pada desain produk, dan menjadi model anggaran warga yang benar-benar ramah pengguna.

Box 2:

Berkat Akses Informasi Dana Bantuan Siswa Miskin Gagal “Disunat”

Berkat kesigapan warga melakukan akses informasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pembagian dana kepada siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP 4 Lingsar Desa Sigerongan Lombok Barat yang tidak semestinya dapat dihindarkan. Pada awalnya warga mendengar kabar bahwa pihak sekolah SMP 4 Lingsar Desa Sigerongan telah membagikan dana BSM kepada 133 siswa. Padahal berdasarkan data yang telah ditetapkan, jumlah penerima seharusnya hanya 89 siswa. Selebihnya tidak layak menerima karena termasuk siswa mampu. Mendengar kabar yang melecehkan rasa keadilan, warga yang tergabung dalam community center (CC) segera berkumpul untuk mendiskusikan masalah ini. Dalam diskusi tersebut terungkap, pembagian BSM ternyata hasil kesepakatan seluruh wali murid dalam rapat yang sebelumnya telah dikondisikan oleh pihak sekolah. Dalam rapat itu juga disepakati bahwa Dana BSM juga digunakan untuk membayar guru honorer, biaya perpindahan, sampul raport, dll. Akibatnya, setiap siswa yang seharusnya menerima Rp 600.000 berkurang tinggal rata-rata Rp 101.000 saja.

Bermaksud ingin mendapatkan informasi lebih jelas tentang mekanisme penyaluran dana BSM, Pak Multajam dan Ibu Kustiyah dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) mengajukan permohonan informasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tentang Petunjuk Pelaksanaan BSM. Permintaan informasi disampaikan pada 15 Januari 2014. Informasi yang diminta langsung diberikan saat itu juga oleh Petugas. Berdasarkan informasi yang didapat, Pak Multajam dan Ibu Kustiyah lalu dapat meyakinkan orang tua siswa bahwa apa yang dilakukan oleh sekolah menyalahi aturan yang berlaku. Pada 24 Januari 2014 CC melakukan hearing ke Dikbud yang dihadiri oleh Musabah dan Mulyadi (CC), Kustiyah dan Multajam dari JMS. Di akhir acara hearing tersebut pihak Dikbud mengintruksikan SMPN 4 Lingsar untuk mengembalikan dana BSM tersebut secara terbuka dengan mengundang wali murid.

Hari Senin, 27 Januari 2014 Musabah menerima undangan dari pihak sekolah terkait rencana pengembalian dana BSM yang sudah terlanjur dibagikan. Acara diagendakan keesokan harinya, yang rencananya akan dihadiri oleh perwakilan wali murid dan anggota CC yang akan mengawal proses pengembalian dana BSM tersebut. Keesokan harinya, Pak Multajam dari JMS dan Yanti dari (CC) menghadiri pertemuan tersebut. Tapi kenyataannya, pihak sekolah tidak langsung mengembalikan dana BSM sesuai undangan, melainkan pihak sekolah dan komite menantang untuk menghadirkan seluruh wali murid kembali pada hari Kamis tanggal 30 Januari untuk merumuskan ulang kesepakatan seperti yang dilakukan sebelumnya oleh sekolah. Kecewa dengan perlakuan sekolah yang mengingkari janjinya, perwakilan CC kemudian mengadakan hal tersebut ke Dikbud. Rombongan diterima oleh Hj. Eny selaku bagian yang membidangi

masalah BSM dan Pak H. Darmilan yang membidangi program dana BOS. Hj. Eny langsung menelpon Pak H. Damiri (Kepala Sekolah SMPN 4 Lingsar) dan kembali menegaskan untuk mengembalikan dana BSM tersebut. Dalam instruksi tersebut juga disampaikan bahwa pihak Dikpora akan langsung turun mengawal proses pembagian dana BSM tersebut.

Rabu tanggal 29 Januari kami melakukan pertemuan di CC Sigerongan untuk merumuskan strategi. Salah satu siswa SMPN 4 Lingsar datang memberitahukan bahwa hari Rabu pagi dana BSM tersebut telah dibagikan oleh pihak sekolah, dan ada pesan dari pihak sekolah “tolong kasih tau Pak Musabah selaku anggota CC dan Kadus Embungpas Barat bahwa uang BSM telah dikembalikan”. Pihak sekolah merasa bahwa CC-lah yang melakukan provokasi sehingga ada tuntutan pengembalian dana BSM. ada hari Kamis tanggal 30 Januari, pihak Dikpora yang diwakili oleh H. Darmilan, saya dan Pak Musabah kembali menghadiri pertemuan di SMPN 4 Lingsar. Banyak hal yang kami bicarakan dan peringatan yang diberikan oleh Dikpora diantaranya : 1. Tidak boleh ada lagi pemerataan pembagian dana BSM, hal itu terjadi karena pihak sekolah tidak melakukan pendataan secara benar dan melakukan verifikasi terkait siswa yang benar-benar miskin. 2. Tidak boleh lagi ada pemotongan dana BSM dengan alasan apapun. 3. Dana BOS harus dipaparkan ke wali murid penggunaannya untuk apa saja. 4. Pihak sekolah harus sering mengundang wali murid untuk update perkembangan yang terjadi di sekolah. 5. Menegaskan bahwa peran CC bukan sebagai provokator melainkan sebagai pusat pengaduan, pusat advokasi, pusat informasi bagi warga.

Box 3:

Perjuangan Perempuan Sumba Mengakses Jamkesmas

Berawal dari kebingungan masyarakat Desa Waipangali di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Provinsi NTT tentang cara mengakses informasi seputar Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah); akhirnya Ketua Posyandu setempat, Kristina Ladi, didampingi rekannya Martha Kalaka mendatangi Dinas Kesehatan (Dinkes) SBD pada 23 Oktober 2013 untuk menyampaikan surat berisi permohonan mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang menyangkut prosedur pengurusan Jamkesmas/Jamkesda bagi warga desa mereka.

Namun hingga Nopember 2013, surat permohonan itu tak kunjung ditanggapi oleh Dinkes SBD hingga berbekal pengetahuan mengenai mekanisme yang tertera dalam UU No 14 Tahun 2008 yang kini populer dengan sebutan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kristina melayangkan surat keberatan yang dialamatkan pada Sekertaris Daerah (Sekda) SBD. UU KIP intinya mewajibkan semua badan publik yang tupoksinya terkait dengan penyelenggaraan negara dan operasionalnya dibiayai sebagian/seluruhnya oleh APBN dan atau APBD **wajib membuka diri** untuk menyampaikan informasi kepada publik dengan beberapa pengecualian untuk informasi yang sifatnya berpotensi membahayakan keamanan negara dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI via Dinkes SBD wajib memberikan informasi Jamkesmas/Jamkesda/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diminta Kristina.

Langkah Kristina mendapat apresiasi khusus dari Sekda SBD, Tony Umbu Zaza, dalam acara Deklarasi Forum Perempuan Rahimku pada bulan Desember 2013 yang dihadiri sekitar 70 (tujuh puluh) orang aktifis perempuan yang berasal dari masyarakat desa, LSM, staf dinas-dinas, dan badan lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBD. Dalam sambutannya saat itu Tony mengungkapkan kekagetannya saat menerima surat keberatan dari dua orang perempuan Desa Weepangali sekaligus dia merasa senang **karena** warga mulai tahu dan paham akan hak-hak mereka atas informasi publik. Bahkan mereka berani melayangkan surat keberatan saat permintaan informasi mereka tak kunjung ditanggapi oleh dinas terkait. Tony juga menekankan agar warga meminta informasi yang dibutuhkan dengan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam UU KIP.

Namun kenyataan di lapangan ternyata tak semulus orasi sang pejabat. Pada bulan Januari 2014, salah seorang anggota keluarga Kristina didiagnosa positif mengidap Leukeimia setelah beberap kali menjalani pemeriksaan di RS Karitas –SBD. Pihak rumah sakit merekomendasikan pasien untuk menjalani pengobatan di rumah sakit Denpasar namun karena tidak memiliki biaya, Kristina menghubungi Dinkes SBD untuk mengusahakan Jamkesmas atau surat rekomendasi lain yang dapat meringankan biaya pengobatan.

Sehari setelah pengajuan Kepala Dinas (Kadis) menelpon Kristina menyiapkan kelengkapan administratif untuk pengurusan Jamkesmas yang langsung dipenuhinya namun hingga seminggu berselang ternyata tak ada tindak lanjut dari Dinkes SBD. Kristina pun melanjutkan upayanya dengan mendatangi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) SBD untuk mencari informasi prosedur pengurusan JKN. Sayangnya, menurut petugas BPJS yang ditemui Kristina, pengurusan JKN membutuhkan waktu yang lama dan tidak bisa langsung ditujukan pada rumah sakit di luar Provinsi NTT. Begitulah akhirnya dengan biaya sendiri dibantu sumbangan keluarga besar, LSM, dan dukungan dana dari Pemkab; Kristina pun dapat memberangkatkan saudaranya untuk menjalani perawatan di Denpasar. Namun takdir berbicara lain, sepulang berobat saudara Kristina tersebut meninggal dunia pada bulan Februari 2014.

Bercermin dari pengalamannya itu, Kristina merasa perlu untuk meminta informasi lengkap tentang pengurusan JKN pada Dinkes SBD. Maka pada 4 April 2014 didampingi Agustinus sesama warga Desa Weepangali dan staf Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (FPM) Pattiro, Kristina pun menyampaikan surat permohonan informasi pada Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kesehatan dalam hal ini Sekertaris Dinkes. Setelah akhirnya mereka diterima di ruang kerja Ketua PPID yang merespon permintaan mereka dengan baik sekaligus memberikan apresiasi atas inisiatif mereka yang dinilai telah membantu tugas pemerintah. Dia juga menyinggung surat keberatan yang diajukan Kristina dan Martha pada Nopember 2013 lalu dan menyatakan sudah mengirimkan surat tanggapan namun Kristina menyatakan tidak menerima surat yang dimaksud.

Saat mereka berbincang, Kepala Dinkes masuk ke ruangan itu untuk menyerahkan cd berisi informasi tentang JKN pada staf FPM Pattiro sekaligus menyatakan bahwa disposisi surat permohonan yang ditujukan pada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sudah dibuat namun berhubung pejabat yang bersangkutan sedang berada di luar, maka Kristina dan kawan-kawan diminta datang lagi pada kesempatan lain. Kristina cukup puas dengan respon yang diberikan Dinkes SBD yang dinilai ramah dan tanggap dalam memberikan dokumen yang diminta. Selanjutnya Kristina bersama rekannya Martha bertekad untuk menyebar-luaskan informasi seputar pengurusan JKN pada segenap lapisan masyarakat desa mereka agar mereka bisa mengakses fasilitas kesehatan yang merupakan hak mereka sebagai warga Indonesia.

diperolehnya menjadi manfaat langsung; dan 4) CC mampu membangun dialog dengan badan publik dalam rangka mengakses informasi, menindaklanjuti informasi yang diperolehnya, dan tantangan dalam mengakses informasi serta solusinya.

Hasil dari peningkatan kapasitas masyarakat ini juga bisa dipahami dari tingkat kemampuan CC yang meliputi: (a) CC mampu mengidentifikasi permasalahan pelayanan di sekitar untuk dikonversi menjadi jenis informasi yang dibutuhkan; (b) CC mampu mengajukan permintaan informasi; (c) CC mendapatkan informasi yang diminta dan didiskusikan menjadi materi untuk advokasi (dan tindak lanjut lainnya); (d) CC mampu mengajukan keluhan (komplain) dan usulan perbaikan pelayanan publik pada unit layanan, sekaligus menyampaikan informasi keluhan kepada badan publik atau mengkonversi menjadi manfaat langsung; dan (e) CC berinisiatif membangun dialog reguler dengan penyelenggara pelayanan. Secara sederhana tahapan tersebut seperti dalam skema berikut.

Insentif dari keterbukaan informasi, pada awalnya hanya terbatas pada sejumlah kecil pegiat warga (elit masyarakat). Karena aktifitasnya, maka elit itu mendapatkan insentif berupa diakuinya sebagai tokoh masyarakat (ketokohan) dan memperoleh insentif ekonomi, biasanya berupa diundang sebagai pembicara di pelatihan, seminar dan diskusi publik serta akses kepada sumber daya ekonomi yang lebih luas. Sedangkan masyarakat secara umum belum memperoleh insentif. Agar insentif ini dapat dinikmati secara kolektif (oleh masyarakat luas), maka perlu segera dilakukan upaya penyebaran atau pergeseran insentif. Dari insentif pribadi kepada insentif kolektif, misalnya berupa pembangunan fisik dan perbaikan pelayanan publik yang diterima dan akses yang lebih terbuka ke sumber daya.

Upaya untuk mentransformasi insentif dari elit kepada kolektif selambat-lambatnya harus dimulai pada fase ketiga (mengkonversi informasi menjadi manfaat langsung) dan fase keempat (membangun dialog dengan badan publik). Tanpa adanya itu, maka keberlanjutan dari CC akan terancam, karena masyarakat secara kolektif tidak merasakan manfaat dari keberadaan CC dan advokasi informasi publik yang dilakukannya selama ini.

Agenda Selanjutnya

Berdasarkan pengalaman PATTIRO dalam isu transparansi selama ini, dan khususnya yang terjadi selama tahun 2014, kami berusaha tetap konsisten untuk mendorong keterbukaan informasi publik pada tingkat warga, badan publik dan komisi informasi. Pada tingkat warga, agenda selanjutnya yang akan dilakukan adalah **meningkatkan permintaan (*demand*) warga atas informasi publik**. Permintaan atas informasi publik harus diakui lebih banyak muncul dari aktifis CSO dan pegiat CC. Agar manfaat keterbukaan informasi publik ini dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, maka harus ada upaya penyadaran kepada seluruh kalangan masyarakat mengenai hak atas informasi dan manfaat meminta informasi publik.



Fokus Area PATTIRO Lainnya

Meningkatnya kesadaran warga ini, akan mendorong meningkatnya permintaan warga atas informasi secara kuantitatif. Jenis-jenis informasi lain yang dibutuhkan warga juga perlu dimintakan kepada badan publik, sehingga pada gilirannya akan mendorong badan publik untuk meningkatkan jenis dan kualitas informasi yang dibutuhkan warga perlu diupayakan adanya permintaan informasi publik. Meningkatnya permintaan ini harus dibarengi dengan meningkatnya kapasitas badan publik, terutama pemerintah. Karena itu, **peningkatan kapasitas kepada badan publik pemerintah dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan warga** akan terus dilakukan, antara lain berupa kemampuan untuk memutakhirkan (*updating*) daftar informasi publik (DIP); analisis atas permintaan informasi dan membangun dialog dengan warga untuk mengetahui kinerja pelayanan informasi dan informasi apa saja yang dibutuhkan warga; mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui penyediaan informasi tertentu secara proaktif baik diminta atau tidak (*pro-active disclosure*); dan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas warga masyarakat yang dapat terpapar informasi, dan mempermudah akses informasi.

Komisi Informasi juga dapat berperan lebih dari melaksanakan tugas utamanya dalam penyelesaian sengketa informasi. Karena sejatinya tugas KI berdasarkan mandat UU KIP pasal 26 mencakup penetapan kebijakan (*policy*), pengaturan (*regulatory*), dan penyelesaian sengketa. Di tingkat kebijakan, berarti KI mendorong adanya kebijakan pelayanan informasi yang selaras dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana dianut oleh UU KIP. Di tingkat pengaturan, KI menyusun aturan-aturan pelaksana agar UU KIP dapat diimplementasikan secara efektif, diantaranya adalah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Salah satu materi juklak dan juknis itu adalah standar layanan informasi publik. Standar layanan ini merupakan standar minimum bagi pelayanan informasi. Dalam konteks isu terkini yaitu implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka PATTIRO menganggap penting untuk **memfasilitasi agar KI dapat menyusun standar layanan informasi publik untuk tingkat desa**.

Fokus Area Pelayanan Publik

Sejak awal berdirinya, PATTIRO telah mengembangkan fokus area pelayanan publik dengan mengembangkan Community Center (CC) sebagai wadah warga untuk berhimpun menyuarakan perbaikan pelayanan publik. Selain fasilitasi masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik (*user/demand*), PATTIRO juga memberikan bantuan teknis kepada pemerintah dan unit layanan agar mampu merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik. Bantuan teknis itu berupa fasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang pelayanan publik; tindak lanjut atas penilaian kinerja pelayanan publik oleh warga¹¹; pengembangan mekanisme penanganan pengaduan dan fasilitasi dialog antar pemangku kepentingan dalam pelayanan publik.

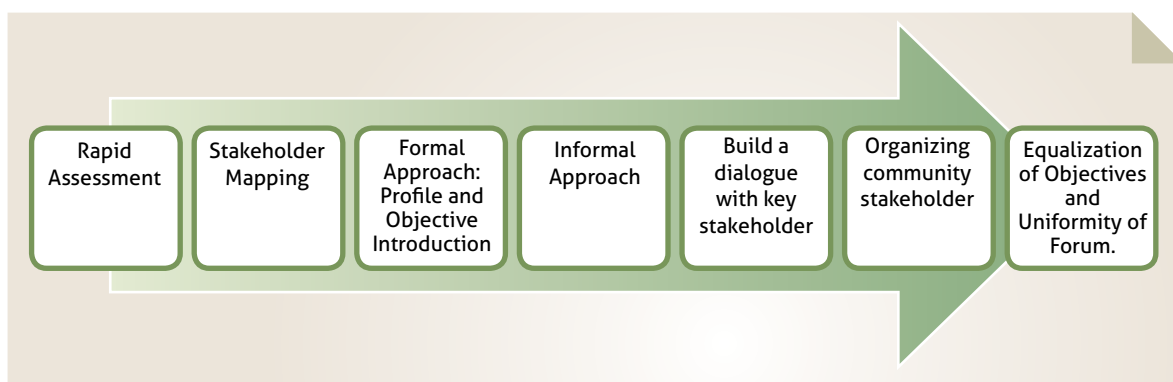
Kegiatan Tahun 2014

Pada tahun 2014, kegiatan di fokus area ini adalah pendampingan terhadap PDAM Kota Malang dalam rangka perbaikan sistem integritas, pembentukan multistakeholder forum (MSF) sektor kesehatan, riset aksi sosial warga untuk perbaikan layanan kesehatan, dan publikasi laporan Citizen Report Card di 20 kabupaten.

1. Pendampingan Implementasi Sistem Integritas Air

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PATTIRO dengan Water Integrity Network (WIN) yang berkantor pusat di Jerman. Kegiatan ini bertujuan mendorong integritas di sektor pelayanan air. Sasaran dari program ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, yaitu Training *Water Integrity Toolbox*, yang dilaksanakan di bulan Mei dan workshop pada bulan November. Peserta training adalah perwakilan dari PDAM Malang, PDAM Makassar, PDAM Surakarta, dan pegiat PATTIRO di tiga daerah tersebut. Materi difokuskan pada pengenalan piranti Water Integrity Toolbox, terutama bagaimana menggunakan dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan piranti tersebut. Sedangkan workshop dikhususkan untuk pemangku kepentingan pelayanan air di Kota Malang. Workshop yang merupakan kelanjutan dari training yang bertujuan untuk menyusun peta jalan (*road map*) PDAM Malang dalam mengimplementasikan Sistem Integritas.

11 Dilakukan antara lain melalui kartu penilaian warga (*citizen report card*) dan survey berbasis pengguna (*user based survey*)



2. Pembentukan Multistakeholder Forum Sektor Kesehatan

Kegiatan ini merupakan bagian dari program advokasi kebijakan sektor kesehatan yang didukung oleh Program Representasi USAID. Pembentukan multistakeholder forum (MSF) dilakukan di dua lokasi, yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Setelah terbentuk, MSF ini kemudian aktif mengkonsolidasi suara warga untuk perbaikan kebijakan di sektor kesehatan.

3. Riset Aksi Sosial Warga untuk Perbaikan Layanan Kesehatan

Kegiatan ini merupakan kerjasama kolaborasi antara PATTIRO, Result for Development (R4D) dan Harvard Kennedy School of Government. Riset bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh informasi terhadap aksi sosial warga untuk menuntut perbaikan pelayanan publik di sektor pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014, tahapan dari riset ini adalah tahapan pilot, yang dilaksanakan di dua desa di provinsi Banten. Kegiatan riset ini akan dilanjutkan di tahun 2015 dengan melaksanakan tahapan *full implementation* yang akan dilaksanakan di 100 desa di dua provinsi, yaitu Provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian

Pada tahun 2014, capaian fokus area pelayanan publik dapat dilihat di level kelembagaan, yaitu tersusunnya peta jalan (*road map*) PDAM Kota Malang untuk melaksanakan sistem integritas air dan terbentuknya multi stakeholder forum (MSF) sektor kesehatan di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.

Lesson Learned

Pendekatan yang digunakan PATTIRO dalam mengorganisasikan MSF dilakukan melalui tujuh tahap, dimulai dari *rapid assessment* hingga pen-yamaan tujuan dan penyepakatan forum. Secara ringkas, tahapan dapat dijelaskan dengan gambar di bawah ini.

Intervensi yang dilakukan sejauh ini sudah menghasilkan berbagai hasil dan pembelajaran. Misalnya di Ungaran Timur dan Bandungan. Di Ungaran Timur,

Gambar 4. Tahapan Pengorganisasian Multistakeholder Forum

ada tindak lanjut terhadap persoalan sanitasi lingkungan. Berkaitan dengan rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama pola pembuangan limbah hitam yang berasal dari buangan biologis, FMS sepakat bahwa sosialisasi harus dilakukan oleh semua pihak, namun simpulnya ialah para kader kesehatan, PKK, dan tokoh agama.

Agenda Selanjutnya

Inisiatif MSF akan dikembangkan lebih lanjut agar paripurna, karena kepercayaan (*trust*) yang sudah terbangun menjadi modal sosial yang dapat dikapitalisasi lebih jauh untuk kepentingan akuntabilitas sosial. Dari refleksi menggunakan kerangka akuntabilitas sosial ini, MSF di Semarang sejauh ini sudah mencapai tahap *trust*, *interactive relations*, dan *collaborative action*. Selanjutnya masih dapat diekspansi ke wilayah learning, dan mulai masuk ke lingkaran outcome.

Salah satu poin penting dari diskusi di MSF ialah mekanisme pengaduan dapat menjadi pengungkit akuntabilitas sosial. Arena MSF memang sejauh ini menjadi ajang verbal bagi penyampaian keluhan wakil-wakil warga yang terlibat. Hal ini perlu diperluas cakupannya

pada masyarakat yang tercakup oleh unit pelayanan. Mekanisme pengaduan yang terintegrasi memungkinkan seluruh keluhan terklasifikasi, sekaligus penanganan oleh unit pelayanan dapat dilacak oleh warga. Penyelenggaraan MSF secara regular dapat memantau tren keluhan dan merekomendasikan penyelesaian tidak hanya ke unit pelayanan namun juga ke DPRD dan Dinas Kesehatan.

Pengintegrasian akan dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi. Salah satunya melalui SMS-Gateway. Pemanfaatan hasil dari SMS Gateway (terutama *loop* pengaduan) ini dalam pembahasan bersama Puskesmas dan Dinas Kesehatan melalui forum dalam rangka pengambilan keputusan yang cepat sehingga akan dapat mengungkit pada perbaikan pelayanan oleh unit layanan (rantai pendek), dan dapat mendorong perbaikan kebijakan pada rantai panjangnya. PATTIRO sendiri telah mempunyai pengalaman menggunakan pesan pendek untuk perbaikan pelayanan air minum di Kota Malang dan Makassar. Hal yang relatif sama perlu diujicobakan untuk kesehatan. Tujuannya tidak hanya untuk mendukung pengaduan, namun bisa juga diarahkan pada fungsi lain, yaitu pendataan, gawat darurat, dan informasi lain. Dalam tahap pengembangan lebih lanjut, informasi disimpan di komputasi awan (*cloud server*) dan disajikan melalui situs (web) sehingga dapat diawasi oleh publik.



Fokus Area Pengelolaan Keuangan Publik

Sejak tahun 2002, PATTIRO telah mengem-bangkan fokus area pengelolaan keuangan publik dengan membentuk jaringan advokasi anggaran daerah, mengembangkan instrumen analisis anggaran daerah, mengembangkan publikasi anggaran daerah yang mudah dipahami oleh masyarakat umum dan mengembangkan anggaran responsif gender.

Kegiatan Tahun 2014

Pada tahun 2014 ini, kegiatan di fokus area ini mencakup advokasi kebijakan, studi implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan training peningkatan kapasitas CSO di dalam melakukan penelusuran anggaran.

1. Advokasi Kebijakan

Di tahun 2014, kegiatan difokuskan pada advokasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015, advokasi Permendagri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD 2015 dan advokasi Permendagri tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2015. Advokasi dilakukan secara kolaboratif antara PATTIRO dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP PA) kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang menerbitkan ketiga Permendagri ini. Substansi utama dari advokasi ini adalah agar Permendagri mengakomodasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

2. Studi Implementasi PPRG

Studi mengenai implementasi PPRG dilakukan di enam provinsi dan enam kabupaten (satu kabupaten dan satu provinsi di masing-masing lokasi studi) dan lima Kementerian. Provinsi dan kabupaten yang menjadi lokasi studi adalah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan; Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo; Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara; Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan; Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sidrap, serta Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan Kementerian yang menjadi obyek studi adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Studi menghasilkan beberapa temuan utama dan rekomendasi. Temuan utama adalah: 1) komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PPRG cukup kuat yang dibuktikan dengan berbagai kebijakan, hanya saja kebijakan tersebut belum diimplementasikan

dengan baik; 2) di semua lokasi studi sudah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), namun di sebagian daerah Pokja itu tidak berjalan optimal; 3) penguatan kapasitas yang telah dilakukan belum memadai karena kurangnya waktu untuk simulasi/praktek; 4) instrumen Gender Analysis Pathway (GAP) dilaksanakan di semua lokasi studi; dan 5) data terpilah dalam bentuk profil dan statistik gender sudah tersedia. Studi menghasilkan rekomendasi antara lain perlunya menetapkan implementasi PPRG sebagai bagian dari indikator kinerja pemerintahan daerah agar PPRG menjadi prioritas pimpinan daerah; perlunya merumuskan SOP penelaahan PPRG di tingkat pusat; dan perlunya mengintegrasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam sistem keuangan daerah melalui advokasi kepada Kemendagri.

Kedua kegiatan tersebut (advokasi kebijakan dan studi) dilaksanakan melalui program *Building Better Budget for Women and The Poor* (B3WP) atas dukungan dana dari The Asia Foundation dan DFATD Kanada.

3. Training Peningkatan Kapasitas CSO

Training dilakukan untuk dua jaringan masyarakat sipil (CSO) di dua provinsi, yaitu provinsi Papua (dilaksanakan pada bulan Maret 2014) dan provinsi NTT (dilaksanakan pada bulan Mei 2014). Materi utama dari pelatihan ini adalah memberikan bekal pengetahuan bagaimana CSO dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah dengan menggunakan berbagai alat, antara lain *budget tracking*, *check my school*, dan audit sosial multistakeholder. Di akhir pelatihan disusun action plan CSO untuk melakukan pengawasan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Kegiatan training ini dilaksanakan melalui Program *Support to CSO in Planning and Budgeting* dengan dana dari AusAID/DFAT Australia.

Capaian

Capaian pada tahun 2014 dapat dibagi menjadi capaian di level kebijakan, dan capaian di level individu. Di level kebijakan, capaiannya adalah: i) diakomodasinya PPRG di dalam Permendagri No 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015; ii) diakomodasinya PPRG di dalam Permendagri No 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2015; dan iii) diakomodasinya PPRG di dalam Permendagri No 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015. Dalam proses advokasi kebijakan pengawasan, telah diterbitkan pula Permen KPP PA No 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi Pemerintah Daerah yang dalam prosesnya melibatkan Inspektorat pemerintah daerah maupun Kementerian Dalam Negeri melalui kegiatan workshop di tiga wilayah, yaitu Bandung,

Surabaya dan Balikpapan, yang dilaksanakan pada bulan Maret-April 2014.

Sedangkan capaian di level individu adalah terlatihnya anggota jaringan CSO tentang pengawasan APBD di Provinsi NTT dan Papua.

Lesson Learned

Tahun 2014 adalah tahun keempat pelaksanaan Program B3WP. Program yang fokus pada advokasi perencanaan dan penganggaran responsif gender ini dilaksanakan sejak tahun 2011 dan berakhir pada bulan Agustus 2014. Selama periode tersebut, telah diperoleh beberapa *lesson learned*, yaitu: i) advokasi kebijakan di tingkat nasional cukup efektif memasifkan pelaksanaan PPRG, khususnya di tingkat daerah; ii) advokasi mengintegrasikan PPRG ke dalam regulasi perencanaan penganggaran yang sudah ada lebih efektif dibandingkan mengadvokasi Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan regulasi khusus terkait PPRG; dan iii) advokasi kolaboratif PATTIRO dengan KPP PA dalam mendorong diakomodasinya PPRG di dalam kebijakan nasional, baik di Surat Edaran Bersama 4 Menteri maupun Permendagri telah memperkaya strategi advokasi PATTIRO.

Agenda Selanjutnya

Implementasi perencanaan penganggaran responsif gender merupakan salah satu agenda advokasi yang telah dilakukan oleh PATTIRO selama 12 tahun terakhir. Perjalanan panjang advokasi PPRG ini dapat dikategorisasikan menjadi tiga fase; yaitu (i) **Fase Pertama (2002-2008)**: PATTIRO melakukan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok perempuan untuk paham anggaran daerah dan mampu mengadvokasi agar APBD dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan kelompok perempuan; (ii) **Fase kedua (2008-2011)**: PATTIRO melakukan strategi dua kaki, yaitu peningkatan kapasitas kelompok perempuan dan jaringan CSO dan sekaligus melakukan peningkatan kapasitas di tingkat pemerintah daerah dan DPRD melalui asistensi teknis; (iii) **Fase Ketiga (2011-2014)**, yaitu advokasi kebijakan di tingkat nasional sebagai upaya *scaling up* hasil-hasil kerja di tingkat daerah ke tingkat nasional. Berdasarkan capaian terakhir, maka agenda selanjutnya adalah (i) mengawal implementasi kebijakan nasional; dan (ii) mendorong integrasi PPRG diakomodasi di dalam regulasi perencanaan penganggaran utama, yaitu dalam proses Revisi Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Prioritas Agenda Tahun 2015

Tahun 2015 adalah tahun yang penuh tantangan. Salah satu agenda besar di tahun 2015 ini adalah mulai diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemberlakuan UU Desa ini banyak mengubah konstelasi pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, karena berdasarkan UU Desa, Desa bukanlah bagian dari pemerintah kabupaten/kota. Hal ini jelas berbeda dengan UU sebelumnya (UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) yang menegaskan Desa adalah bagian dari pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, kepastian sumberdaya yang diserahkan kepada Desa dalam bentuk alokasi langsung dari APBN maupun peningkatan prosentase dari dana perimbangan kabupaten/kota yang menjadi hak Desa telah menjadikan implementasi UU Desa menjadi perhatian dari berbagai komponen bangsa karena jumlah dana yang akan dikelola oleh Desa diprediksi meningkat signifikan.

Optimisme dan Pesimisme. Implementasi UU Desa disikapi beragam oleh para pemangku kepentingan. Di satu sisi, ada pihak yang optimis, bahwa UU Desa membawa harapan baru bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat desa. Dana yang akan dikelola oleh Desa akan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui apa yang disebut dengan istilah **Desa Membangun**. Di sisi lain, ada pula pihak yang pesimis, bahwa implementasi UU Desa akan membawa banyak persoalan, terutama persoalan korupsi yang diprediksi akan terjadi secara masif mengingat keberagaman kapasitas desa di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, PATTIRO berpendapat bahwa saat ini adalah saatnya untuk bertindak, mengawal implementasi UU Desa agar harapan positif kehadiran UU Desa dapat terealisasi dan potensi dampak negatif dari implementasi UU Desa dapat dicegah.

PATTIRO memandang setidaknya ada dua hal yang perlu dikawal terkait dengan implementasi UU Desa, yaitu: (i) transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan (ii) kemandirian desa.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah satu hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan karena hanya dengan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel visi dari UU Desa akan tercapai. Di dalam proses pembahasan di DPR, terlihat jelas bagaimana para pemangku kepentingan mengkhawatirkan keuangan desa tidak dikelola dengan baik yang dapat berujung dengan proses hukum bagi pengelolanya yaitu kepala desa dan perangkat desa dan sekaligus akan menjadikan visi UU Desa menjadi tidak tercapai.

PATTIRO berpendapat bahwa kekhawatiran dari para pemangku kepentingan ini perlu dipandang sebagai tantangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Agar kepala desa dan perangkat desa dapat mengelola keuangan desa secara akuntabel, maka perlu disiapkan hal-hal sebagai berikut: (i) **Integritas dari kepala desa dan perangkat desa.** Integritas adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa. Jika memiliki integritas yang baik, maka kepala desa dan perangkat desa akan memandang keuangan desa sebagai amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga desa; (ii) **Tata kelola.** Hal kedua yang harus ada agar pengelolaan keuangan desa akuntabel adalah adanya sistem pengelolaan keuangan yang sederhana tapi kuat dan adanya transparansi pengelolaan keuangan di tingkat desa; (iii) **Kapasitas SDM.** Agar pengelolaan keuangan desa dapat akuntabel, maka dibutuhkan pengelola yang kompeten. Dalam hal ini, pelatihan dan pendampingan kepada kepala desa dan perangkat desa menjadi hal yang wajib untuk dilakukan, khususnya oleh tim kecamatan dan tim kabupaten. Perlu disadari bersama bahwa peningkatan kapasitas adalah suatu proses yang membutuhkan waktu. Jika dikaitkan antara kapasitas dengan jumlah dana yang menjadi hak desa untuk dikelola, maka ada *trade off* yang harus dilakukan. Asas kehati-hatian (*prudent*) perlu dilaksanakan oleh Kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mencairkan dana yang menjadi hak desa; (iv) **Pengawasan warga.** Salah satu katup pengaman untuk mencegah penyimpangan dana adalah pengawasan oleh warga. Oleh karena itu, jika kondisi warga cenderung abai/tidak peduli dan belum bersikap kritis untuk mengawasi pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, maka Pemerintah daerah, khususnya kabupaten perlu melakukan upaya peningkatan partisipasi warga di dalam melakukan pengawasan. Untuk itu, PATTIRO akan mengembangkan instrumen pengawasan oleh warga.

Kemandirian Desa. Tujuan akhir dari implementasi UU Desa adalah terwujudnya kemandirian Desa, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Untuk perlu perlu dikembangkan instrumen untuk mengukur kemajuan kemandirian dari suatu Desa agar dapat diketahui apa saja yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran kemandirian Desa ini, para pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi perbaikan. Untuk itu, PATTIRO akan mengembangkan instrumen untuk mengukur kemajuan kemandirian Desa.

Produk-produk Pengetahuan PATTIRO 2014



Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO. Keterlibatan aktif masyarakat atau kelompok masyarakat (CSO) dalam tahap *budget implementation* diperlukan untuk meminimalisir adanya penyimpangan penggunaan anggaran. Pengalaman masyarakat sipil melakukan pengawasan anggaran memberikan gambaran mengenai sistem pengawasan partisipatif yang telah dikembangkan oleh banyak pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil yang bekerja di wilayah advokasi anggaran. Selain itu, pengalaman ini membuktikan pentingnya partisipasi dan penguatan masyarakat dalam pengawasan anggaran untuk mendorong akuntabilitas pemerintah. Untuk itu PATTIRO bekerjasama dengan AIPD (*Australia Indonesia Partnership for Decentralisation*) menyusun sebuah Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO sebagai pegangan substansi materi atas kegiatan-kegiatan pelatihan pengawasan APBD yang dilakukan oleh CSO.

Mekanisme Komplain Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat.

Buku ini ditulis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme komplain pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. UU Nomor 25 Tahun 2009 memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penjelasannya penulis mengetengahkan pelayanan publik di era otonomi daerah berserta permasalahannya. Di dalam buku ini pembaca akan diberikan petunjuk bagaimana cara membentuk pusat informasi warga (Community Center). Langkah-langkah melakukan komplain pelayanan publik hingga contohnya di daerah. Sebagai pelengkap buku ini memberikan contoh tentang Maklumat Pelayanan di Puskesmas Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dalam pembahasannya juga mengetengahkan tentang Ombudsman Republik Indonesia.



Laporan Studi Implementasi PPRG. Dalam rangka pelaksanaan PUG yang menjadi salah satu dari tiga arus utama pembangunan nasional, pemerintah menetapkan PPRG sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi didorong untuk mendukung PUG sebagai strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol

proses pembangunan. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan sudut pandang gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Studi ini dilakukan untuk memetakan perubahan yang terjadi dalam tiga tahun terakhir 2010-2013 mengenai implementasi PPRG, sebuah momentum sejak dikeluarkannya RPJMN tahun 2010-2014 sampai dengan dikeluarkannya STanas Percepatan PUG melalui PPRG. Studi ini dilakukan di 6 provinsi (Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatra Utara), dan di 5 Kementrian (Kementrian PU, Kementrian Pertanian, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian KUKM, dan Kementrian Kesehatan).

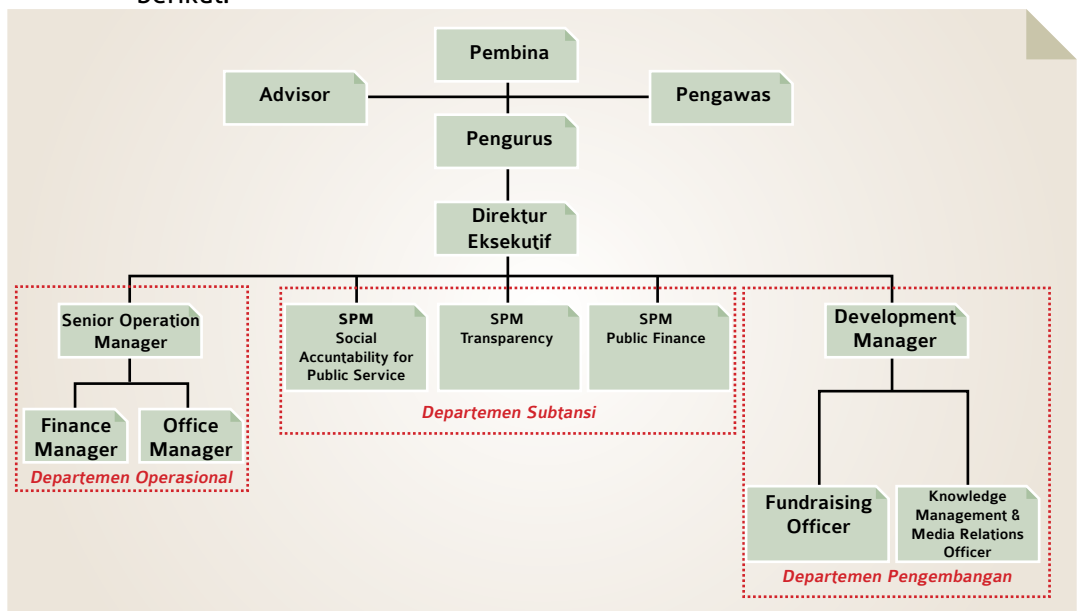
Dinamika Internal Kelembagaan

Melanjutkan Renstra PATTIRO pada awal tahun 2012 dan dilanjutkan dengan Rencana Kerja 2014, semangat untuk melakukan perbaikan atas tiga peran strategis terus dilakukan. Tiga peran strategis dimaksud adalah: 1) melakukan pengelolaan pengetahuan; 2) advokasi; dan 3) pengembangan kapasitas pegiat dan penguatan kelembagaan. Meskipun belum optimal, berbagai hal menyangkut implementasi atas tiga peran strategis tersebut telah dijalankan.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan tiga peran strategis dan tetap melakukan kerja-kerja pada tiga fokus area (transparansi, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan publik) dukungan operasional menyangkut pekerjaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Restrukturisasi Organisasi

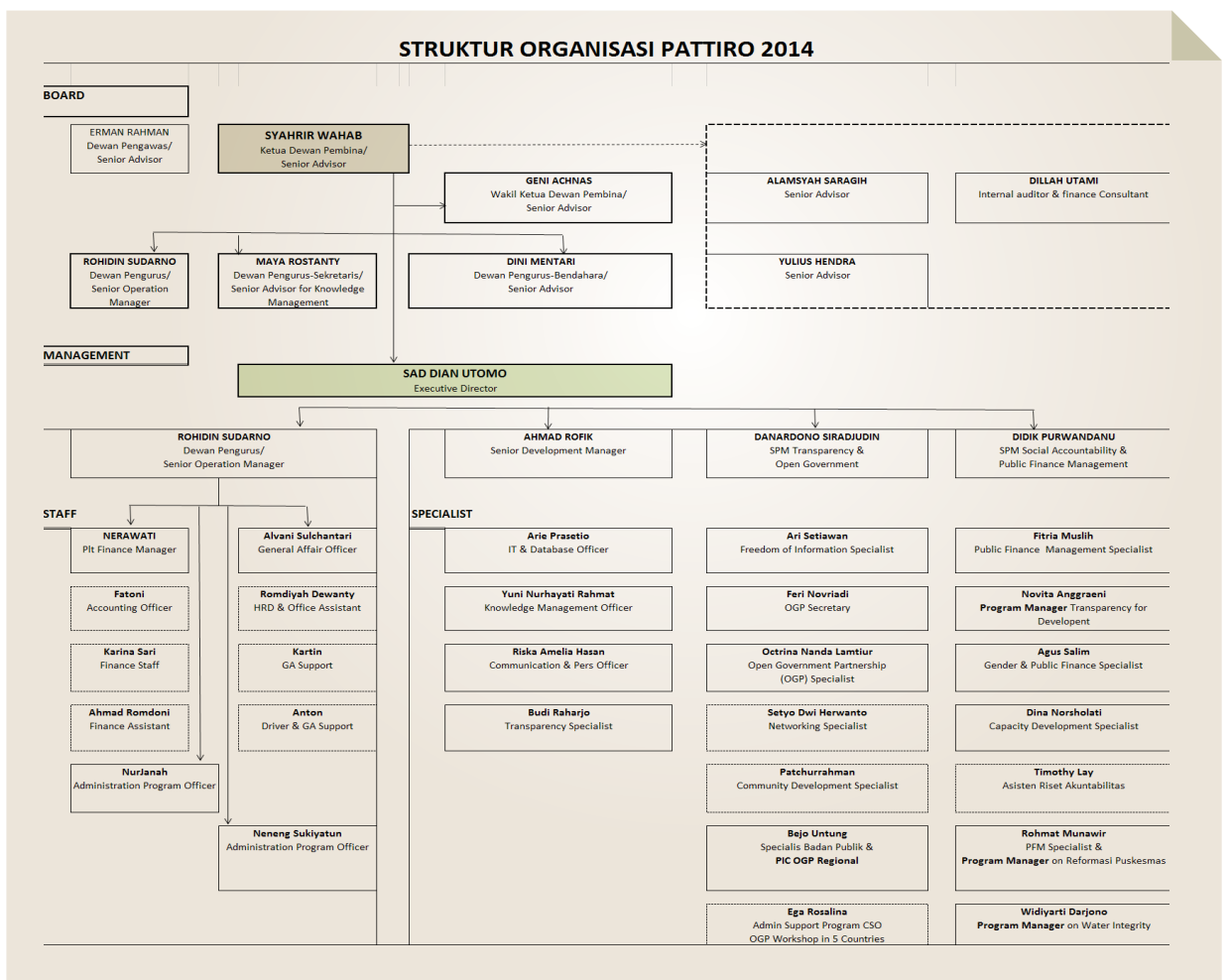
Tahun 2014 menjadi tahun dengan dinamika struktur organisasi yang relatif 'besar'. Salah satunya adalah untuk merespon perkembangan program untuk masing-masing fokus area. Tercatat pada tahun 2014 PATTIRO mengelola 15 hibah dari berbagai lembaga/proyek donor. Struktur organisasi pada desain awal tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Semangat awal dari struktur organisasi PATTIRO 2014 adalah membangun dan meningkatkan kapasitas lembaga dan kapasitas pegiat. Adapun harapannya, roda organisasi akan berjalan lebih baik dan mendukung pengembangan lembaga, karena ada penjaga (*key person*) yang tidak terlibat dalam program. Sedangkan kerja utama dari struktur organisasi adalah mengawal visi dan misi organisasi agar bisa dicapai, sehingga semangat PATTIRO akan tetap terjaga.

Dari struktur organisasi pada awal tahun 2014 itu, dalam perkembangannya telah terjadi perubahan. Meskipun pengawasan terhadap pelaksanaan program tetap bisa dilakukan lembaga melalui SPM (*Senior Program Manager*). Namun dalam perkembangannya terjadi penggabungan Jabatan Senior Program Manager (SPM) Social Accountability for Public Service dan SPM Public Finance menjadi ditangani SPM Social Accountability dan Public Finance Management.

Di bawah ini adalah perubahan struktur organisasi PATTIRO pada akhir tahun 2014.



b. Penerapan Mekanisme Rekrutmen Terbuka

Pada tahun 2014 terjadi perkembangan jumlah pegiat. Sampai Desember 2014, tercatat pegiat di Jakarta sebanyak 35 orang atau meningkat 6% dibanding tahun 2013. Adapun pegiat di daerah tercatat mencapai 149 orang. Hal ini terkait dengan banyaknya program yang dikelola PATTIRO. Agar kegiatan yang dikelolanya memberikan hasil yang optimal, maka PATTIRO perlu memastikan bahwa sumber daya manusia, pegiat yang mengelola kegiatan-kegiatan tersebut memiliki kualifikasi teknis yang dibutuhkan. Karena itu mekanisme rekrutmen terbuka menjadi pilihan. Dengan pertimbangan melalui mekanisme ini peluang untuk mendapatkan pegiat yang berkualitas lebih besar dibanding rekrutmen tertutup. Proses perekrutan dimulai dari penyampaian lowongan atas posisi yang dibutuhkan, seleksi atas lamaran yang masuk dan penetapan hasil seleksi dan pengangkatan pegiat. Mekanisme rekrutmen terbuka ini berlaku baik untuk yang belum pernah bergabung di PATTIRO maupun pegiat yang telah bekerja di PATTIRO.

c. Peningkatan Kapasitas Pegiat

Memahami pentingnya kapasitas pegiat dalam melaksanakan berbagai kegiatannya, maka PATTIRO berusaha terus meningkatkan kapasitas para pegiatnya. Peningkatan kapasitas pegiat dilakukan melalui berbagai media, antara lain pelatihan di internal PATTIRO, pelatihan yang dilakukan oleh pihak luar, workshop, melibatkan pegiat dalam menyusun dokumen kebijakan, policy brief dan artikel dan studi lapangan baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagian besar peningkatan kapasitas diarahkan bagi pegiat yang menangani substansi dan melaksanakan program di tiga fokus area. Sedangkan peningkatan kapasitas pegiat di bidang administrasi, kantor dan keuangan relatif belum banyak dilaksanakan. Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas yang untuk pegiat administrasi, kantor dan keuangan antara lain adalah pelatihan mengenai pajak, pelatihan dokumentasi foto dan pelatihan bahasa Inggris.

d. Manajemen Keuangan

Secara umum pengelolaan keuangan relatif sudah tertata baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator: (i) proses audit keuangan tahunan berjalan baik, untuk mulai audit tahun 2013 dan 2014; (ii) proses penyusunan laporan keuangan program juga dapat dilaksanakan tepat waktu; (iii) proses pencatatan akuntansi dan keuangan berjalan lancar perangkat lunak SANGO (*Software Accounting for Non Government Organization*); (iv) laporan keuangan di daerah program juga terpantau baik; dan (v) dukungan perencanaan keuangan untuk program dan lembaga juga telah berjalan. Salah satu kontribusi penting dari pengelolaan keuangan adalah melakukan review dan monitoring keuangan lembaga. Peran ini cukup signifikan untuk mengatasi masalah

dan potensi masalah yang mungkin terjadi dengan pelaksana program di Jakarta, di daerah dan unit lain di PATTIRO.

**YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL
JAKARTA**
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in Rupiah)

**YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL
JAKARTA**
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Description	Dec 31, 2014	Notes/ Cttn	31 Des 2013	Keterangan
Assets				Aset
Current Assets				Aset Lancar
Cash and Cash Equivalent	7.337.554.386	B.4, C.1	2.052.768.678	Kas dan Setara Kas
Account Receivable	813.777.754	C.2	3.990.828.341	Piutang
Advance Payment	572.151.788	C.3	4.765.408.435	Uang Muka
Prepaid Expense	-	C.4	61.938.700	Biaya Dibayar Dimuka
Total Current Assets	8.723.483.928		10.870.944.154	Jumlah Aset Lancar
Non-Current Assets				Aset Tidak Lancar
Fixed asset-net of accumulated depreciation of Rp73.213.006 in 2014 and Rp111.441.777 in 2013	77.220.431	B.6, C.5	73.579.346	Aset tetap-setelah dikurangi Akumulasi penyusutan Rp73.213.006 pada tahun 2014 dan Rp111.441.777 pada tahun 2013
Total Non-Current Assets	77.220.431		73.579.346	Jumlah Aset Tidak Lancar
Total Assets	8.800.704.359		10.944.523.500	Jumlah Aset
Liabilities and Net Assets				Liabilitas dan Aset Neto
Current Liabilities				Liabilitas Lancar
Payable	559.963.610	C.6	3.948.429.747	Hutang
Accrued Expense	301.067.204	C.7	321.578.826	Biaya yang Masih Harus Dibayar
Tax Payable	6.075.556	C.8	35.062.570	Hutang Pajak
Other Payable	53.145.209	C.9	95.281.427	Hutang Lain-lain
Total Current Liabilities	920.251.579		4.400.352.570	Jumlah Liabilitas Lancar
Long-Term Liabilities				Liabilitas Jangka Panjang
Bank Loan	-	C.10	-	Hutang Bank
Total Long-Term Liabilities	-		-	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
Net Assets		C.11		Aset Neto
Unrestricted Net Assets	5.089.402.196		1.750.770.978	Aset Neto Tidak Terikat
Restricted Net Assets	2.791.050.584		4.793.399.952	Aset Neto Terikat
Total Net Assets	7.880.452.780		6.544.170.930	Jumlah Aset Neto
Total Liabilities and Net Assets	8.800.704.359		10.944.523.500	Jumlah Liabilitas dan Aset Neto

Description	Year 2014			Notes/ Catatan	Tahun 2013			Keterangan
	Unrestricted	Restricted	Total		Tidak Terikat	Terikat	Total	
Receipt								
Grant	580.866.002	20.729.924.483	21.310.790.485	B.5, C.12	538.305.570	31.146.435.135	31.684.740.705	Penerimaan Hibah
Contribution	9.663.539.236	-	9.663.539.236	C.13	6.398.990.324	23.167.332	6.422.157.656	Kontribusi
Ending Restricted of Net Assets	-	-	-		-	-	-	Aset Neto yang Bersih Batasannya
Other Income	76.664.173	33.162.172	109.826.345	C.14	22.691.994	11.405.302	34.097.296	Penerimaan Lain-lain
Total Receipt	10.321.069.411	20.763.086.655	31.084.156.066		6.959.988.088	31.181.007.769	38.140.995.857	Total Penerimaan
Disbursement								
Program Expense	1.397.822.011	16.364.656.600	17.762.478.611	B.5, C.15	1.086.469.547	14.544.840.735	15.631.310.302	Pengeluaran Biaya Program
General and Administrative Expense	5.271.804.302	6.641.611.813	11.913.416.115	C.16	4.919.953.340	6.824.394.948	11.744.348.288	Biaya Administrasi dan Umum
Fundraising Expense	68.355.990	3.623.500	71.979.490	C.17	333.098.150	757.000	333.855.150	Biaya Penggalangan Dana
Other Expense	-	-	-	C.18	270.904.446	4.392.022.616	4.662.927.062	Biaya Lain-lain
Total Disbursement	6.737.982.303	23.009.891.913	29.747.874.216		6.610.425.483	25.762.015.319	32.372.440.802	Total Pengeluaran
Increasing / (Decreasing) Net Asset	3.583.087.108	(2.246.805.258)	1.336.281.850		349.562.605	5.418.992.450	5.768.555.055	Kenaikan / (Penurunan) Aset Bersih
NET ASSETS				C.11				ASET NETO
Beginning Balance of Net Assets	1.750.770.978	4.793.399.952	6.544.170.930		1.401.208.373	(625.592.498)	775.615.875	Saldo Awal Aset Neto
Changing in Net Assets								Perubahan Aset Neto
Prior year adjustment of net assets	(244.455.890)	244.455.890	-		-	-	-	Penyesuaian aset neto periode lalu
Increasing/(decreasing) of net assets	3.583.087.108	(2.246.805.258)	1.336.281.850		349.562.605	5.418.992.450	5.768.555.055	Kenaikan / (penurunan) aset neto
Ending Balance of Net Assets	5.089.402.196	2.791.050.584	7.880.452.780		1.750.770.978	4.793.399.952	6.544.170.930	Saldo Akhir Aset Neto

See the accompanying notes which form an integral part of these financial statement
Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

